

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA**

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada tanggal 31 Desember 2024 dan
2023 (Tidak Diaudit)**

***INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION***

***Financial Statements
For the Years Ended
31 December 2024 and
2023 (Unaudited)***

Daftar Isi

**Halaman/
Page**

Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi

Directors' Statement Letter

Laporan Auditor Independen

Independent Auditor's Report

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan
2023 (Tidak Diaudit)**

***Financial Statements
For the Years Ended
31 December 2024 and
2023 (Unaudited)***

Laporan Posisi Keuangan

1

Statements of Financial Position

Laporan Penghasilan Komprehensif

2

Statements of Comprehensive Income

Laporan Perubahan Aset Neto

3

Statements of Changes in Net Assets

Laporan Arus Kas

4

Statements of Cash Flows

Catatan Atas Laporan Keuangan

5

Notes to the Financial Statements

Lampiran 1

Appendix 1



PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA

THE INDOONESIAN PLANNED PARENTHOOD ASSOCIATION

Jl. Hang Jebat III/F3, Kebayoran Baru, Jakarta 12120 - INDONESIA
Phones : (62-21) 7207372, 7394123, 7206413, 7231326, 7205804 Fax. : (62-21) 7394088
Cable Address : IPPA Jakarta E-mail : ippa@pkbi.or.id

Pelapor Keluarga Berencana di Indonesia

**SURAT PERNYATAAN BADAN PENGURUS
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANPA PENERAPAN PSAK 110
PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
("PERKUMPULAN")
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(TIDAK DIAUDIT)**

**BOARD OF MEMBER'S STATEMENT
REGARDING RESPONSIBILITY FOR
THE NON IFAS 110 FINANCIAL STATEMENTS
INDONESIAN PLANNED PARENTHOOD ASSOCIATION
("THE FEDERATION")
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(UNAUDITED)**

Atas nama dan mewakili Badan Pengurus,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

*For and behalf on Board of Member's Statement,
We, the undersigned:*

Nama
Alamat Kantor

Dr. Ichsan Malik, M. Si

Name
Office Address

Alamat Domisili / sesuai KTP atau
Kartu Identitas lain
Nomor Telepon
Jabatan

*Address of Dimicile /Based on
ID Card
Telephone
Title*

Ketua Pengurus/ Chairman

Nama
Alamat Kantor

Lenny Jakaria, S.ST., M.Pd

Name
Office Address

Alamat Domisili/ sesuai KTP atau
Kartu Identitas lain
Nomor Telepon
Jabatan

*Address of Dimicile/Based on
ID Card
Telephone
Position*

Direktur Eksekutif/ Executive Director

Menyatakan bahwa :

State that :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia ("Perkumpulan");
2. Laporan Keuangan Perkumpulan telah dimodifikasi sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dijelaskan pada Catatan 2;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Perkumpulan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan Perkumpulan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perkumpulan.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements Indonesian Planned Parenthood Association ("the Federation");*
2. *The Federation's financial statements have been modified in accordance accounting policies as described in Note 2;*
3. a. *All information in the Financial Statements of the Federation has been completely and properly disclosed;*
b. *The Financial Statements of the Federation do not contain any improper material information or facts, and do not omit any material information or facts; and*
4. *We are responsible for the internal control systems of the Perkumpulan.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus, this statement is made truthfully.

Jakarta, 3 Maret 2026/ March 3, 2026

Dr. Ichsan Malik, M. Si
Ketua Pengurus/ Chairman

Lenny Jakaria, S.ST., M.Pd
Direktur Eksekutif/ Executive Director



Anggota International Planned Parenthood Federation, sejak 1967

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Registered Public Accountants

Nomor/Number : R/0025.AAT/MHW/2026

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Dewan Pengawas dan Pengurus/
Board of Supervisors and Management

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia/ Indonesian Planned Parenthood Association

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia ("Perkumpulan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi material. Laporan keuangan telah disusun oleh manajemen dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perkumpulan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan kebijakan akuntansi sebagaimana yang diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perkumpulan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the financial statements of Indonesian Planned Parenthood Association ("Federation"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2024, and the statement of other comprehensive income, statement of changes in net assets and statement of cash flows for the year ended, and notes to the financial statements, including a material accounting policies information. The financial statements have been prepared by management using accounting policies described in Note 2 to the financial statements.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Federation as at December 31, 2024, and its financial performance and its cash flows for the year ended, in accordance with accounting policies as described in Note 2 to the financial statements.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Federation in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Registered Public Accountants is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)



Penekanan Suatu Hal – Basis Akuntansi dan Pembatasan Distribusi dan Penggunaan

Kami membawa perhatian pada Catatan 2 atas laporan keuangan yang menjelaskan dasar akuntansi. Laporan keuangan ini juga disusun sesuai dengan perjanjian antara Donor dan Perkumpulan. Oleh karena itu, laporan keuangan ini mungkin tidak sesuai untuk tujuan lain.

Laporan keuangan ini merupakan laporan keuangan entitas tunggal dan tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian yang mencakup entitas anak, sebagaimana yang diwajibkan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia untuk pelaporan bertujuan umum. Laporan kami ditujukan semata-mata untuk Perkumpulan dan Donor, sehingga tidak diperkenankan untuk didistribusikan kepada atau digunakan oleh pihak selain Perkumpulan dan Donor. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perkumpulan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perkumpulan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perkumpulan.

Emphasis of Matters – Basis of Accounting and Restriction on Distribution and Use

We draw attention to Note 2 to the financial statement, which describes the basis of accounting. The financial statement is prepared in accordance with agreement between Donor and Federation. As a result, the financial statement may not be suitable for another purpose.

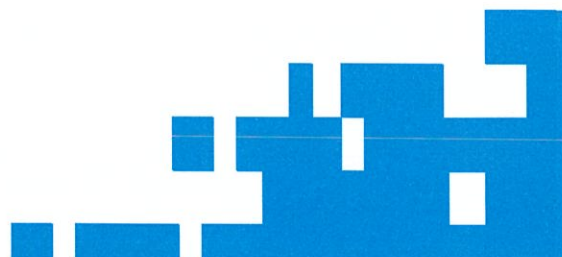
These financial statements are prepared as single entity financial statements and do not present consolidated financial statements including subsidiaries, as might be required by Indonesian Financial Accounting Standards for general-purpose reporting. Our report is intended solely for Federation and Donor and should not be distributed to or used by parties other than Federation and Donor. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Federation's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Federation or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Federation's financial reporting process.



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

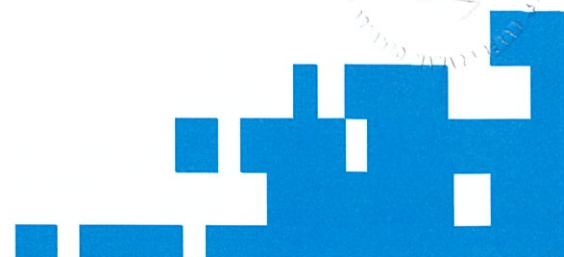
- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perkumpulan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the FEDERATION's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Federation's ability to*



kemampuan Perkumpulan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perkumpulan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Federation to cease to continue as a going concern.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

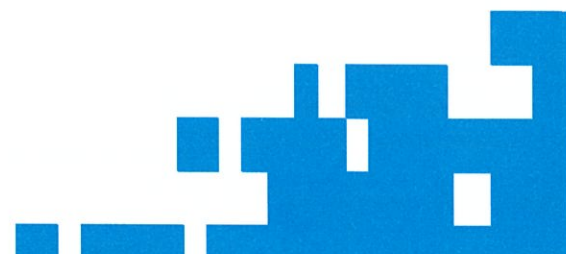
Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Maxson Hakim Wijaya

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1680/
Public Accountant License Number: AP.1680

Jakarta, 3 Maret/ March 3, 2026



**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**
As of 31 December 2024 and 2023 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024 Rp	2023 Rp	
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan Setara Kas	4	23,162,533,600	24,933,176,968	Cash and Cash Equivalents
Investasi Lancar		144,517,642	134,555,175	Current Investment
Piutang Lain-lain	5	6,729,809,173	--	Other Receivables
Persediaan		74,547,557	79,377,564	Inventories
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	6	9,516,275,737	--	Advances and Prepayments
Pajak Dibayar Dimuka	11. a	9,029,550	--	Prepaid Taxes
Jumlah Aset Lancar		39,636,713,259	25,147,109,707	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Non-Current Assets
Aset Tetap - Bersih	7	11,664,755,769	15,357,425,707	Fixed Assets - Net
Aset Lain-lain	8	14,000,000,000	13,690,000,000	Other Assets
Investasi pada Entitas Anak	9	281,875,000	281,875,000	Investment to Subsidiaries
Jumlah Aset Tidak Lancar		25,946,630,769	29,329,300,707	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		65,583,344,028	54,476,410,414	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN ASET NETO				LIABILITIES AND NET ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas Lancar				Current Liabilities
Biaya yang Masih Harus Dibayar	10	4,374,313,049	2,231,238,509	Accruals
Utang Pajak	11. b	1,379,188,449	1,080,082,779	Taxes Payable
Pendapatan Ditangguhkan	12	9,358,570,805	8,576,731,032	Deferred Revenues
Dana Titipan	13	11,966,865,073	2,294,733,228	Fund Deposits
Utang Lain-lain		288,403,121	411,798,183	Other Payables
Jumlah Liabilitas Lancar		27,367,340,497	14,594,583,731	Total Current Liabilities
Liabilitas Tidak Lancar				Non-Current Liabilities
Imbalan Pascakerja	14	3,733,315,231	3,017,107,109	Post-Employment Benefit Liabilities
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar		3,733,315,231	3,017,107,109	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		31,100,655,728	17,611,690,840	TOTAL LIABILITIES
ASET NETO				NET ASSETS
Tanpa Pembatasan dari Sumber Daya	15	34,002,947,451	43,585,716,561	Without Restriction from Donors
Dengan Pembatasan dari Sumber Daya	15	479,740,849	(6,720,996,987)	With Restriction from Donors
JUMLAH ASET NETO		34,482,688,300	36,864,719,574	TOTAL NET ASSETS
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		65,583,344,028	54,476,410,414	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
financial statements as a whole

PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

INDONESIAN PLANNED PARENTHOOD ASSOCIATION
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024			2023			
		Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya/ Without restriction from donors Rp	Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya/ With restriction from donors Rp	Jumlah/ Total Rp	Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya/ Without restriction from donors Rp	Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya/ With restriction from donors Rp	Jumlah/ Total Rp	
PENDAPATAN	16							REVENUES
Sumbangan		7,946,274,495	122,562,489,897	130,508,764,392	8,901,908,170	126,616,941,061	135,518,849,231	Grants
Penerimaan Lainnya		11,925,994,548	5,460,600,584	17,386,595,132	16,124,543,850	203,150,646	16,327,694,496	Other Income
Jumlah Pendapatan		19,872,269,043	128,023,090,481	147,895,359,524	25,026,452,020	126,820,091,707	151,846,543,727	Total Revenues
BEBAN								EXPENSES
Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (Strategi 1)	17	839,732,761	8,320,988,972	9,160,721,733	357,475,600	13,567,959,121	13,925,434,721	Sexual and Reproductive Health Services (Strategy 1)
Program Anak dan Remaja & Gerakan Kesehatan Nasional (Strategi 2)	17	733,763,653	3,889,513,054	4,623,276,707	305,296,291	3,650,911,706	3,956,207,997	Children and Youth Programmes & National Health Movements (Strategy 2)
Penanggulangan HIV & AIDS dan Kampanye Penghapusan Stigma dan Diskriminasi Berbasis Masyarakat (Strategi 3)	17	5,799,437,741	107,658,415,791	113,457,853,532	3,776,608,017	122,613,855,022	126,390,463,039	HIV & AIDS Prevention and Community - based Stigma and Discriminations Elimination Campaign (Strategy 3)
Advokasi Untuk Pemenuhan Hak - Hak Seksual dan Reproduksi (Strategi 4)	17	35,208,701	824,755,047	859,963,748	--	821,587,354	821,587,354	Advocacy for the Fulfillment of Sexual and Reproductive Rights (Strategy 4)
Pengelolaan Pengetahuan dan <i>Monitoring and Evaluation</i> , Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Manajemen, Pusat Informasi, Edukasi, Konseling Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), dan Mobilisasi Sumber Dana (Strategi 5)	17	--	99,603,331	99,603,331	4,174,952,716	1,533,234,206	5,708,186,922	Knowledge Management and Monitoring and Evaluation, Organizational and Management Capacity Building, Information Center, Education, Sexual and Reproductive Health Rights (HKSR) Counseling, and Mobilization of Funding Resources (Strategy 5)
Administration General Support (Strategi 6)	17	22,133,641,784	29,076,450	22,162,718,234	21,917,453,248	444,296	21,917,897,544	Administration General Support (Strategy 6)
Jumlah beban		29,541,784,640	120,822,352,645	150,364,137,285	30,531,785,872	142,187,991,705	172,719,777,577	Total expenses
(PENURUNAN)/KENAIKAN BERSIH SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(9,669,515,597)	7,200,737,836	(2,468,777,761)	(5,505,333,852)	(15,367,899,998)	(20,873,233,850)	NET (DEFICIT)/SURPLUS BEFORE INCOME TAX
Beban Pajak Penghasilan		--	--	--	--	--	--	Income Tax Expense
(PENURUNAN)/KENAIKAN TAHUN BERJALAN		(9,669,515,597)	7,200,737,836	(2,468,777,761)	(5,505,333,852)	(15,367,899,998)	(20,873,233,850)	(DEFICIT)/SURPLUS FOR THE CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN								OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti		86,746,487	--	86,746,487	74,712,555	--	74,712,555	Remeasurement of Define Benefits Plan
TOTAL ASET NETO TAHUN BERJALAN		(9,582,769,110)	7,200,737,836	(2,382,031,274)	(5,430,621,297)	(15,367,899,998)	(20,798,521,295)	TOTAL NET ASSETS FOR THE CURRENT YEAR

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
financial statements as a whole

PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
 (Disajikan Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

INDONESIAN PLANNED PARENTHOOD ASSOCIATION
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS

For the Years Ended
 31 December 2024 and 2023 (Unaudited)
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya/ <i>Without restriction from donors</i> Rp	Dengan pembatasan dari pemberi sumber daya/ <i>With restriction from donors</i> Rp	Jumlah aset neto/ <i>Total net assets</i> Rp	
Saldo per 31 Desember 2022	49,016,337,858	8,646,903,011	57,663,240,869	Balance as of 31 December 2022
(Penurunan)/Kenaikan Tahun Berjalan	(5,505,333,852)	(15,367,899,998)	(20,873,233,850)	(Deficit)/Surplus for the Current Year
Penghasilan Komprehensif Lain	74,712,555	--	74,712,555	Other Comprehensive Income
Saldo per 31 Desember 2023	43,585,716,561	(6,720,996,987)	36,864,719,574	Balance as of 31 December 2023
(Penurunan)/Kenaikan Tahun Berjalan	(9,669,515,597)	7,200,737,836	(2,468,777,761)	(Deficit)/Surplus for the Current Year
Penghasilan Komprehensif Lain	86,746,487	--	86,746,487	Other Comprehensive Income
Saldo per 31 Desember 2024	34,002,947,451	479,740,849	34,482,688,300	Balance as of 31 December 2024

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements as a whole

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit)
(Disajikan Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
STATEMENTS OF CASH FLOWS**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Defisit Aset Neto Tahun Berjalan	(2,382,031,274)	(19,672,607,480)	Deficit Net Assets For the Year
Penyesuaian:			Adjustment for:
Depresiasi Aset Tetap	4,028,384,590	2,549,657,396	Depreciation of Fixed Assets
Beban Imbalan Pascakerja	542,715,149	569,951,357	Post-Employment Expenses
Rugi (laba) Penghapusan Aset	6,444,033,907	(431,393,657)	Loss (gain) on Disposal Assets
Keuntungan dari Perubahan Nilai Wajar Investasi	(9,962,467)	(9,481,187)	Gain on Fair Value of Investments
Perubahan dalam aset dan liabilitas:			Changes in assets and liabilities:
Piutang Lain-lain	(11,042,246,407)	1,084,696,317	Other Receivables
Persediaan	4,830,007	124,066,157	Inventories
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka	(9,516,275,737)	3,811,279,130	Advances and Prepaid Expenses
Pajak Dibayar di Muka	(9,029,550)	--	Prepaid Taxes
Biaya yang Masih Harus Dibayar	1,686,964,210	(217,993,968)	Accruals
Utang Pajak	299,105,670	640,970,246	Taxes Payables
Pendapatan Ditangguhkan	781,839,773	6,638,760,253	Deferred Revenues
Dana Titipan	9,672,131,845	769,641,525	Fund Deposits
Utang Lain-lain	(123,395,062)	125,639,432	Other Payables
Kas bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	377,064,654	(4,016,814,479)	Net Cash Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian Investasi	(310,000,000)	--	Purchase of Investment
Penerimaan dari Penjualan Investasi	--	7,130,000,000	Proceeds from Sale of Investment
Perolehan Aset Tetap	(2,202,997,112)	(2,658,007,565)	Acquisition of Fixed Assets
Penerimaan Dividen	365,289,090	--	Receipt of Dividend
Kas bersih (Digunakan untuk)/ Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(2,147,708,022)	4,471,992,435	Net Cash (Used in)/ Provided by Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	--	--	CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
(PENURUNAN)/ KENAIKAN BERSIH DALAM KAS DAN SETARA KAS	(1,770,643,368)	455,177,956	NET (DECREASE)/ INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	24,933,176,968	24,477,999,012	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	23,162,533,600	24,933,176,968	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
financial statements as a whole

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum	1. General
1.a Pendirian Organisasi dan Informasi Umum Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (selanjutnya disebut "PKBI") berkedudukan di Jakarta Selatan didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 dan memperoleh ijin sebagai suatu badan hukum dari Menteri Kehakiman pada tanggal 22 Juni 1967 melalui Surat Keputusan No. J.A.5/45/24. Anggaran Dasar PKBI telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir adalah Akta Notaris Yulita Harastati, S.H., nomor 18 tanggal 22 Desember 2023. Perubahan tersebut memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0000037.AH.01.08. Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024. PKBI bertujuan mewujudkan terciptanya keluarga bertanggung jawab guna mencapai tujuan umum keluarga sejahtera dalam upaya perbaikan mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia dengan senantiasa memperhatikan aspek ketahanan fisik, sosial budaya, mental dan spiritual dan hak asasi manusia. Sumber utama pendapatan PKBI adalah hibah dari <i>Internasional Planned Parenthood Federation</i> ("IPPF"), di mana PKBI merupakan salah satu anggotanya; donor dari donatur lainnya; serta berasal dari kegiatan penggalangan dana secara lokal (Catatan 16). Untuk mencapai tujuannya, PKBI menyediakan beberapa layanan tertentu antara lain sebagai berikut: 1. Penyusunan dan pengembangan informasi program pendidikan dan pelatihan, termasuk aplikasi audio, media visual serta media massa; 2. Jasa medis dan klinik, pemberian saran pada perkembangan teknologi keluarga berencana, serta pemeliharaan statistik pelayanan klinik. Perkumpulan memiliki 25 cabang dan 1 Kantor Pusat terletak di Jakarta sebagai berikut: 1. Aceh - Cabang Banda Aceh	1.a Establishment of Organization and General Information <i>Indonesian Planned Parenthood Association (herein referred as "IPPA") domiciled in South Jakarta was established on 23 December 1957 and has obtained permit as a legal entity from the Minister of Justice on 22 June 1967 through Decision Letter No. J.A.5/45/24.</i> <i>IPPA's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment was based on Notary Deed of Yulita Harastati S.H., number 18 dated 22 December 2023. The changes was approved by the Ministry of Law and Human Rights of Republic Indonesia with No. AHU-0000037.AH.01.08. Tahun 2024 dated 10 January 2024.</i> <i>IPPA aims to create a responsible family in order to achieve the common goal of a prosperous family with the aim of improving the quality of Indonesia's human resources (HR) by always paying attention to the aspects of physical, socio-cultural, mental and spiritual resilience and human rights.</i> <i>IPPA's primary sources of income are grants from the International Planned Parenthood Federation ("IPPF"), of which IPPA is a member; donations from other donors; and IPPA's local fundraising activities (Note 16).</i> <i>In order to carry out its objectives, IPPA provides certain services among others as follows:</i> 1. <i>Preparation and development of information, education and training programmes, including the use of audio-visual and mass media;</i> 2. <i>Medical and clinical services, advice on family planning technologies and maintenance of statistics on clinical services.</i> <i>The Federation have 25 branches and 1 Head Office as follows:</i> 1. <i>Aceh - Banda Aceh Branch</i>

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2. Sumatera Utara - Cabang Medan
3. Riau - Cabang Pekanbaru
4. Sumatera Barat - Cabang Padang
5. Kepulauan Riau - Cabang Bintan
6. Jambi - Cabang Jambi
7. Bengkulu - Cabang Bengkulu
8. Sumatera Selatan - Cabang Palembang
9. Lampung - Cabang Banda Lampung
10. Daerah Khusus Ibukota Jakarta -
Cabang Jakarta
11. Jawa Barat - Cabang Bandung
12. Jawa Tengah - Cabang Semarang
13. Daerah Istimewa Yogyakarta - Cabang
Yogyakarta
14. Jawa Timur - Cabang Surabaya
15. Bali - Cabang Denpasar
16. Nusa Tenggara Barat - Cabang Mataram
17. Nusa Tenggara Timur - Cabang Kupang
18. Kalimantan Barat - Cabang Pontianak
19. Kalimantan Tengah - Cabang
Palangkaraya
20. Kalimantan Selatan - Cabang
Banjarmasin
21. Kalimantan Timur - Cabang Samarinda,
22. Sulawesi Utara - Cabang Manado
23. Sulawesi Tengah - Cabang Palu
24. Sulawesi Selatan - Cabang Makassar
25. Papua - Cabang Jayapura

Perkumpulan berdomisili di Jl. Pejaten Raya
No.16a, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta
Selatan.

2. North Sumatera - Medan Branch
3. Riau - Pekanbaru Branch
4. West Sumatera - Padang Branch
5. Riau Island - Bintan Branch
6. Jambi - Jambi Branch
7. Bengkulu - Bengkulu Branch
8. South Sumatera - Palembang Branch
9. Lampung - Banda Lampung Branch
10. Special Capital Region of Jakarta -
Jakarta Branch
11. West Java - Bandung Branch
12. Central Java - Semarang Branch
13. Special Region of Yogyakarta -
Yogyakarta Branch
14. East Java - Surabaya Branch
15. Bali - Denpasar Branch
16. West Nusa Tenggara - Mataram Branch
17. East Nusa Tenggara - Kupang Branch
18. West Kalimantan - Pontianak Branch
19. Central Kalimantan - Palangkaraya
Branch
20. South Kalimantan - Banjarmasin Branch
21. East Kalimantan - Samarinda Branch
22. North Sulawesi - Manado Branch
23. Central Sulawesi - Palu Branch
24. South Sulawesi - Makassar Branch
25. Papua - Jayapura Branch

The Federation is domiciled in Jl. Pejaten
Raya No.16a Ragunan, Pasar Minggu, South
Jakarta.

1.b Struktur Manajemen

Struktur manajemen PKBI pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai
berikut:

Ketua
Wakil Ketua I
Wakil Ketua II
Wakil Ketua III
Wakil Ketua IV
Wakil Ketua V
Sekretaris
Wakil Sekretaris I
Wakil Sekretaris II
Bendahara
Wakil Bendahara

Dr. Ichsan Malik, M.Si
Farid Husni, S.H
dr. Soeharjanto Ary Soekadi, M.PsiT
Dra. Hj. Safira Machrusah, M.A (A.S.)
Reza Anugrah
Dr. H. Farid Wadjdy, M.Pd
Dra. Josephine Rosa Marietta, M.Psi
Mahyuzar, M.Si
Serli Hayati Putri
Dra. Retno Dewanti, M. Psi
Muhammad Iqbal

Chairman
Vice Chairman I
Vice Chairman II
Vice Chairman III
Vice Chairman IV
Vice Chairman V
Secretary
Vice Secretary I
Vice Secretary II
Treasurer
Vice Treasurer

1.b. Management Structure

The composition of IPPA's management
structure as of 31 December 2024 and 2023
are as follows:

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Struktur pengawas PKBI pada tanggal
31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai
berikut:

*The composition of IPPA's supervisors as of
31 December 2024 and 2023 is as follows:*

Ketua
Sekretaris
Anggota I
Anggota II
Anggota III

Dr. (H.C) dr H. Hasto Wardoyo, Sp. OG
Nur Hasyim, M.A
H. Mustar Labolo, S.Sos, M.Pd
Hendi Koncara Gurnita, S.E
Robert Tangdilian

Chairman
Secretary
Member I
Member II
Member III

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan ini telah disusun sesuai dengan basis akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2. Pada laporan keuangan ini Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia tidak menerapkan PSAK 110 "Konsolidasi" meskipun memenuhi kriteria penerapan standar tersebut.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Perkumpulan tidak menyusun laporan keuangan konsolidasian dan tidak mengakui PT Adhiwarga Mandiri Sejahtera dan PT Adicita Swara Publika sebagai entitas anak untuk keperluan laporan keuangan ini. Dengan demikian, laporan keuangan ini hanya mencerminkan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang terkait dengan kegiatan Perkumpulan secara individual.

Laporan keuangan ini disusun untuk memenuhi persyaratan pelaporan internal Perkumpulan kepada donor, sehingga tidak dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan Perkumpulan beserta entitas anaknya, serta tidak untuk tujuan umum.

b. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 117: Kontrak Asuransi;
- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 - Informasi Komparatif; dan

2. Material Accounting Policy Information

a. Basis of preparation of the financial statements

This accounting basis is from Financial Accounting Standards as described in Note 2. In these financial statements the Indonesian Planned Parenthood Association is not implementing PSAK 110 "Consolidation" even though it complies with the criteria for implementation of the standard.

As mentioned before, the Federation does not prepare consolidated financial statements and does not recognize PT Adhiwarga Mandiri Sejahtera and PT Adicita Swara Publika as subsidiaries for the purposes of these financial statements. Accordingly, these financial statements reflect only the assets, liabilities, revenues, and expenses related to the Federation activities on an individual basis.

The financial statements have been prepared to meet the Federation internal reporting requirements to donors, and are therefore not intended to provide a comprehensive overview of the financial position and performance of the Federation and its subsidiaries, nor are they intended for general purposes.

b. Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") Effective in the Current Year

New Standard and amendment to standards which effective for periods beginning on or after 1 January 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 117: Insurance Contract;
- Amendments PSAK 117: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 - Comparative Information; and

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran.

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 103: Kombinasi Bisnis;
- PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
- PSAK 109: Instrumen Keuangan;
- PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 207: Laporan Arus Kas;
- PSAK 216: Aset Tetap;
- PSAK 219: Imbalan Kerja;
- PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 232: Instrumen Keuangan Penyajian;
- PSAK 236: Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi;
- PSAK 238: Aset Takberwujud;
- PSAK 240: Properti Investasi.

Implementasi amendemen standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

c. Aset dan liabilitas keuangan

PSAK 109: “Instrumen Keuangan”

PKBI melakukan penerapan PSAK 109, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

PKBI mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

- Amendments PSAK 221: The Effect of Foreign Exchange Rate Changes on Exchange Deficit.

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 117: Insurance Contracts, as follows:

- PSAK 103: Business Combinations;
- PSAK 105: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;
- PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures;
- PSAK 109: Financial Instruments;
- PSAK 115: Revenue from Contracts with Customers;
- PSAK 201: Presentation of Financial Statements;
- PSAK 207: Statement of Cash Flows;
- PSAK 216: Fixed Assets;
- PSAK 219: Employee Benefits;
- PSAK 228: Investment in Associated Entities and Joint Ventures;
- PSAK 232: Financial Instruments: Presentation;
- PSAK 236 Impairment of Asset;
- PSAK 237: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets;
- PSAK 238: Intangible Assets;
- PSAK 240: Investment Property.

The implementation of the above amendment to standards had no material on the amounts reported for the current period or prior financial year.

c. Financial assets and liabilities

PSAK 109: “Financial Instruments”

IPPA's has applied PSAK 109, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

IPPA's classifies its financial assets in the following categories:

- Financial assets at fair value through statements of profit or loss or other comprehensive income;
- Financial assets at amortized cost.

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga. PKBI menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2024, PKBI memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi meliputi kas dan setara kas, investasi lancar, piutang lain-lain dan investasi tidak lancar. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap periode pelaporan, PKBI menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Ketika melakukan penilaian, PKBI menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas kredit ekspektasian.

Liabilitas keuangan

Dalam melakukan penilaian, PKBI membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajiban serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest. IPPA determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification already made at initial application.

On 31 December 2024, IPPA has financial assets classified as financial assets at amortized cost. Financial assets at amortized cost consist of cash and cash equivalents, current investment, other receivables and non-current investments. Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current.

Cash and cash equivalents include cash in hand, deposits held at call with banks, other short-terms highly liquid investment with original maturities of three months or less.

Impairment of financial assets

At each reporting date, IPPA's assess whether the credit risk on a financial instrument has increase significantly since initial recognition.

When making the assessment, IPPA use the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses.

Financial liabilities

To make that assessment, IPPA compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 109 diklasifikasikan sebagai berikut:

- i. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- ii. Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

PKBI menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

PKBI memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain biaya yang masih harus dibayar, utang lain-lain dan dana titipan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pemberhentian pengakuan atas liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Financial liabilities within the scope of PSAK 109 are classified as follows:

- i. Financial liabilities at amortized cost;*
- ii. Financial liabilities at fair value through profit and loss (FVTPL) or other comprehensive income (FVOCI).*

IPPA determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

IPPA has financial liabilities classified into the financial liabilities measured at amortized cost. All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in the profit or loss.

Financial liabilities measured at amortized cost are accrued expenses, other payables and fund deposits. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

Derecognition of financial liabilities

Financial liabilities are derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another liability with substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amount is recognized in the statements of profit or loss.

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Instrumen keuangan saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan PKBI atau pihak lawan.

Offsetting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realize the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of IPPA or the counterparties.

d. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun diakui dalam laba rugi.

d. Foreign currency transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rate prevailing at the date of transaction. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in profit or loss.

Kurs yang digunakan pada tanggal laporan posisi keuangan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut (dalam Rupiah penuh):

As at the statement of financial position dates, the exchange rates used, based on the middle rates published by Bank Indonesia, were as follows (full Rupiah amount):

	2024 Rp	2023 Rp	
Dolar Amerika Serikat ("USD")	16,162	15,416	United States Dollar ("USD")

e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Sesuai dengan PSAK No. 224 (Revisi 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", suatu pihak dianggap berelasi jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan, secara langsung atau tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

e. Transactions with related parties

In accordance with PSAK No. 224 (Revised 2015) on "Related Party Disclosures", parties are considered to be related if one party has to ability to control (through ownership, directly or indirectly) or exercise significant influence (through participation in the financial and operating policies) over the other party in making financial and operating decisions.

f. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank dan deposito berjangka dalam bentuk cair atau investasi jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dan yang tidak dijaminkan.

f. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consisted of cash on hand, cash in banks and time deposits are liquid or short-term investment held with the original maturities of 3 (three) months or less and, which are not pledged.

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

g. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar biaya terendah atau nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama (MPKP). Persediaan yang diterima sebagai hibah diakui sebesar nilai wajar pada tanggal penerimaan, yang ditentukan berdasarkan daftar harga terkini IPPF.

h. Aset tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan dan siap digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset tetap diakui sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai.

Biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Penyusutan berlaku bagi komponen lain aset tetap untuk mengurangi nilai tercatat terhadap umur manfaat ekonomis yang diharapkan. Umur manfaat ekonomis yang diharapkan adalah sebagai berikut:

	<u>Tahun/ Years</u>	
Bangunan	20	<i>Buildings</i>
Peralatan dan perlengkapan	8	<i>Furnitures and fixtures</i>
Kendaraan	8	<i>Vehicles</i>
Peralatan medis	8	<i>Medical equipments</i>
Peralatan kantor	4	<i>Office equipments</i>
Peralatan audio visual	4	<i>Audio visual equipments</i>

Beban penyusutan diperhitungkan di dalam laporan aktivitas selama tahun buku dimana beban tersebut terjadi.

Perbaikan dan perawatan diperhitungkan kedalam laporan aktivitas selama tahun dimana perbaikan dan perawatan terjadi.

Biaya renovasi dan restorasi utama digabungkan kedalam nilai tercatat aset jika

g. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined by the First-In, First-Out (FIFO). Inventories received as grant are recognized at fair value on the date of receipt, which determined based on the current IPPF's price list.

h. Fixed assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchases price and any cost directly attributable in bringing the assets to location and working condition where it is intended to be used.

After initial recognized, fixed assets are recognized at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses.

The initial cost of fixed assets consists if its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable cost in bringing the fixed assets to its working condition and location for its intended use.

Depreciation is provided on all other items of fixed assets so as to write off their carrying value over their expected usefull economic life. It is provided at the following rates:

Depreciation expenses are taken to statements of activities during the financial year in which they are incurred.

Repair and maintenance expenses are taken to statements of activities during the financial year in which they incurred.

The cost of major renovations and restorations is included in the carrying

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

biaya tersebut memiliki kemungkinan untuk memberikan manfaat di masa depan yang jumlahnya melebihi standar kinerja pada penilaian awal aset yang ada yang akan mengalir kedalam PKBI dan disusutkan sebesar sisa umur manfaat tersebut.

Nilai sisa, masa manfaat dan metode depresiasi, dikaji pada tiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan secara prospektif sesuai keadaan.

Ketika terdapat indikasi penurunan nilai, nilai tercatat aset dinilai dan segera dicatat berdasarkan jumlah terpulihkan.

Keuntungan atau kerugian pelepasan aset tetap ditentukan dengan membandingkan penerimaan dengan nilai tercatat dan dicatat kedalam laporan aktivitas.

i. Aset neto

Jika sumber daya yang diterima, mensyaratkan PKBI untuk memenuhi kondisi melekat pada sumber daya tersebut, maka sumber daya tersebut disajikan sesuai dengan kondisi dan sifatnya oleh pemberi sumber daya. Sehingga PKBI menyesuaikan penyajian aset neto dalam laporan keuangannya menjadi:

Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya - dimana tujuan penggunaan dana tidak dibatasi atau tidak ditentukan secara spesifik oleh para pemberi sumber daya, sebelumnya disajikan sebagai aset neto tidak terikat.

Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya - dimana tujuan penggunaan dana telah dibatasi oleh pemberi sumber daya, sebelumnya disajikan sebagai aset neto terikat.

j. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan hibah

Dana hibah yang diberikan oleh donatur diklasifikasikan sebagai hibah terbatas (dibatasi oleh donatur untuk peruntukkan yang telah ditentukan) awalnya dicatat sebagai pendapatan ditangguhkan dan piutang dengan persetujuan, dan diakui sebagai pendapatan pada saat pembebanan dan diterima dana untuk tujuan tertentu.

amount of the asset when it probable that the future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the IPPA and depreciated over the remaining useful life of the asset.

The residul value, useful life and depreciation method are reviewed at the end of each reporting period and adjusted prospectively, if appropriate.

Where an indication of impairment exists, the carrying amount of the asset is assessed and written down immediately to its recoverable amount.

Gains or losses on disposal are determined by omparing proceeds with the carrying amount and are included in statements of activities.

i. Net assets

If the resource received requires IPPA to meet the conditions attached to the resource, then the resource is presented according to its condition and nature by the resource provider. So that IPPA adjusts the presentation of net assets in its financial statements to:

Without Restrictions from Resources Provider - where the purpose of using the funds is not limited or not specifically determined by the resource providers, previously presented as unrestricted net assets.

With Restrictions from Resources Provider - where the intended use of the funds has been restricted by the resource providers, previously presented as restricted net assets.

j. Revenues and expenses recognition

Grant income

Cash granted by donors is classified as restricted grant (restricted by the donors for the intended purpose) is initially recorded as Deferred revenues and receivables upon approvals, and recognized as income upon expended and receipt of the fund for the special purpose.

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Dana hibah yang diberikan oleh donatur diklasifikasikan sebagai hibah tak terbatas (tanpa pembatasan penggunaan dari donatur karena tanpa peruntukkan tertentu) diakui sebagai pendapatan pada saat diterima dari donatur. Hibah non-kas yang diberikan oleh donatur dapat diklasifikasikan sebagai hibah terbatas (penggunaanya tanpa pembatasan dari donatur) awalnya dicatat dalam aset neto uang ditentukan dan diakui sebagai pendapatan dan beban pada saat penggunaan barang persediaan yang diterima atau selama masa manfaat ekonomis aset tetap diterima.

Layanan sukarela yang diterima tanpa nilai moneter tidak diakui dalam laporan keuangan.

Pendapatan dana program

Pendapatan dari klinik medis diakui sebagai pendapatan setelah jasa diberikan. Pendapatan dari dana program diakui sebagai pendapatan pada saat diperoleh.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).

k. Pajak penghasilan

Entitas menerapkan PSAK No. 212 (Revisi 2023) "Pajak Penghasilan".

Pajak kini

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak penghasilan badan yang terutang saat ini dan pajak tangguhan.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan dan lalu diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat restitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di laporan posisi keuangan, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Cash granted by donors is classified as unrestricted grant (without restriction from donors as without specific purpose) is recognized as income upon receipt of the grant. Non-cash granted by donors either classified as restricted grant (restricted by the donors for inted purpose) or unrestricted grant (without restricted from donors as to the purpose) is initially recorded in the designated net assets and recognized as income and expenses upon consumption of the items inventory received or over the estimated useful life of the assets received.

Voluntary services received without monetary value are not recognized in the financial statements.

Incomes from fund-raising program

Income from medical clinics recognized as income after the service has been rendered. Income from fund-raising programs recognized as income as earned.

Expenses

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

k. Income taxes

The Entity apply PSAK No. 212 (Revised 2023) "Income tax".

Current tax

Income tax expense represents the sum of the corporate income tax currently payable and deferred tax.

Current tax assets and liabilities for current and prior years are measured at the amount expected to be refunded from or paid to the taxation authority.

The tax rates and tax regulations used to calculate the amount are those that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax assets and liabilities are presented in the statements of financial position in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Penghasilan kena pajak berbeda dengan laba yang dilaporkan dalam laba atau rugi karena penghasilan kena pajak tidak termasuk bagian dari pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan ditahun-tahun yang berbeda, dan juga tidak termasuk bagian-bagian yang tidak dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding ketika hasil banding diputuskan.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal yang belum terpakai, sepanjang besar kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal yang belum terpakai tersebut dapat dimanfaatkan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasikan, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat dikurangkan dan rugi pajak belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan.

Liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan (jika memenuhi kriteria) diakui atas perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada Entitas anak dan asosiasi, kecuali yang waktu pembalikannya dapat dikendalikan dan kemungkinan besar perbedaan temporer tersebut tidak akan dibalik dimasa depan yang dapat diperkirakan.

Taxable profit differs from profit as reported in the profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received or if appealed against, when the results of the appeal are determined.

Deferred tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and unused tax losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which the deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses can be utilized.

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui sebelumnya ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diakui sepanjang laba kena pajak yang akan datang kemungkinan besar akan tersedia untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan dipakai pada saat aset direalisasikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Pajak tangguhan sehubungan dengan bagian yang diakui diluar laba atau rugi diakui diluar laba atau rugi. Pajak tangguhan tersebut diakui berkaitan dengan transaksi baik yang ada di penghasilan komprehensif lain atau langsung dibebankan ke ekuitas.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas aset pajak tangguhan saling-hapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas aset pajak kini atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada Entitas yang sama, atau kelompok usaha yang bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas lancar berdasarkan jumlah neto.

PKBI tidak mengakui aset pajak tangguhan yang berhubungan dengan manfaat masa depan yang dihasilkan dari akumulasi rugi fiskal karena ketidakpastian dalam menentukan manfaat dimasa yang akan datang.

I. Imbalan pascakerja

PKBI menghitung imbalan pascakerja berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 6/2023 (UU Ciptaker No.6/2023) dan Pedoman Ketenagakerjaan yang berlaku, tertuang dalam PSAK 219 tentang Imbalan

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and unused tax losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which the deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses can be utilized.

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current year operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax relating to items recognized outside of profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in other comprehensive income or directly in equity.

Deferred tax asset and deferred tax liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to the same taxable Entity, or the Entity intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

The IPPA are not recognize deferred tax assets relating to the carry forward of unused tax losses because of the uncertainty of assessing future profit.

I. Post-employment benefits

The IPPA calculated post-employment benefit liabilities in accordance with the accordance with under Law No. 6/2023 about Manpower (UU Ciptaker No. 6/2023) and Employment Guidelines Regulations, as

Kerja untuk 31 Desember 2024 dan 2023.

stated in PSAK 219 concerning Employee Benefits as of 31 December 2024 and 2023.

Jumlah pegawai yang berhak atas imbalan tersebut masing-masing berjumlah 39 dan 41 pegawai untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.

The number of employees entitled to the benefits is 39 and 41 employees as of for the year ended 31 December 2024 and 2023, respectively.

Liabilitas imbalan pascakerja dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the Projected Unit Credit method.

Biaya jasa lalu yang timbul dari amendemen atau kurtailmen program diakui sebagai beban dalam laporan aktivitas pada saat terjadinya.

Past service costs arising from amendment or curtailment programs are recognized as expense in statement of activities when incurred.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan pasti di laporan posisi keuangan merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

The benefit obligation recognized in the statement of financial position represents the present value of the defined benefit obligation, as adjusted for unrecognized actuarial gains and losses and unrecognized past service cost.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan laporan aktivitas.

Remeasurements arising from adjustments and changes in actuarial assumptions are directly recognized in statements of activities.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian kewajiban imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Gains or losses on the curtailment or settlement of the defined benefit obligation are recognized when the curtailment or settlement occurs.

3. Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi Akuntansi Signifikan

Penyusunan laporan keuangan PKBI mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Keberlangsungan usaha

Manajemen PKBI telah membuat penilaian atas kemampuan PKBI untuk terus melanjutkan usahanya dan merasa puas bahwa PKBI memiliki sumber daya untuk

3. Significant Accounting Judgments, Estimates and Assumptions

The preparation of the IPPA financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgment

Going concern

IPPA's management has made an assessment of IPPA's ability to continue as a going concern and is satisfied that the IPPA has the resources to continue in business for

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

melanjutkan bisnis di masa yang akan datang. Selanjutnya, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan atas kemampuan PKBI untuk terus berlanjut sebagai kelangsungan usaha. Oleh karena itu, laporan keuangan terus disusun berdasarkan kelangsungan usaha.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini.

PKBI mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali PKBI. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap selama 4 sampai 20 tahun.

Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana PKBI menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Imbalan pascakerja

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi PKBI diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah liabilitas yang diakui dimasa mendatang.

the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon IPPA's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below.

IPPA based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of IPPA. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Depreciation of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 up to 20 years.

These are common life expectancies applied in the industries where the IPPA conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

Post-employment benefits

The determination of post-employment benefits liabilities depends on selection of certain assumption used by actuary for the calculation of the liability. These assumptions include discount rate and rate of increase in salaries. Different realization from IPPA's assumptions is accumulated and amortized over the future periods and consequently will affect the liabilities recognized in the future.

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. Kas dan Setara Kas		4. Cash and Cash Equivalents	
	2024 Rp	2023 Rp	
Kas	73,485,019	58,800,408	Cash on hand
Bank			Banks
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	16,346,278,583	19,585,394,525	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	496,090,162	382,316,744	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	264,763,481	863,214,606	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Sinarmas Syariah	240,046,396	256,777,738	PT Bank Sinarmas Syariah
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	91,109,661	944,413,013	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	11,447,041	61,615,817	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp50.000.000)	9,688,108	56,870,942	Others (each below Rp50,000,000)
Dolar Amerika Serikat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3,915,825,362	515,573,937	United States Dollar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Subjumlah	21,375,248,794	22,666,177,322	Subtotal
Deposito berjangka			Time deposits
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	963,799,787	958,199,238	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Sinarmas Syariah	700,000,000	700,000,000	PT Bank Sinarmas Syariah
PT Bank CIMB Niaga Tbk	50,000,000	550,000,000	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Subjumlah	1,713,799,787	2,208,199,238	Subtotal
Jumlah	23,162,533,600	24,933,176,968	Total
Tingkat suku bunga per tahun:		The annual interest deposits:	
	2024	2023	
Deposito Rupiah	3.50% - 7.50%	2.00% - 5.75%	Time deposits Rupiah
Deposito berjangka merupakan deposito yang jatuh tempo selama 3 (tiga) bulan sejak penempatan.		Time deposits represents deposits with maturities less than 3 (three) months after their placement.	

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Rincian kas dan setara kas pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

The details of cash and cash equivalents for headquarter and regional are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Nasional	12,114,369,257	11,461,829,518	Nasional
Jawa Tengah	3,904,858,952	3,950,512,093	Central Java
Jawa Timur	1,145,847,694	934,487,986	East Java
Riau	751,682,567	841,210,562	Riau
Bali	711,057,748	997,118,380	Bali
DI Yogyakarta	598,086,208	1,641,008,554	DI Yogyakarta
Bengkulu	590,792,155	643,318,082	Bengkulu
Jawa Barat	520,196,735	510,213,033	West Java
Nusa Tenggara Timur	498,858,305	384,643,893	East Nusa Tenggara
DKI Jakarta	460,807,574	452,153,243	DKI Jakarta
Nusa Tenggara Barat	428,872,251	512,083,947	West Nusa Tenggara
Kalimantan Timur	407,202,479	429,303,417	East Kalimantan
Sumatera Barat	174,289,778	406,064,357	West Sumatera
Kalimantan Selatan	166,356,313	203,413,049	South Kalimantan
Papua	122,660,645	45,420,112	Papua
Sulawesi Selatan	116,355,484	140,979,323	South Sulawesi
Sulawesi Utara	108,732,751	17,617,946	North Sulawesi
Kepulauan Riau	90,242,334	92,692,666	Riau Archipelago
Sumatera Utara	72,304,995	24,118,369	North Sumatera
Kalimantan Tengah	63,444,155	53,356,298	Central Kalimantan
Aceh	32,068,526	995,769,086	Aceh
Kalimantan Barat	23,977,581	36,502,045	West Kalimantan
Sulawesi Tengah	23,686,205	8,929,352	Central Sulawesi
Sumatera Selatan	17,253,544	75,008,955	South Sumatera
Lampung	9,351,124	4,753,692	Lampung
Jambi	9,178,240	70,669,010	Jambi
Jumlah	23,162,533,600	24,933,176,968	Total

5. Piutang Lain-Lain

5. Other Receivables

	2024 Rp	2023 Rp	
Program	6,291,313,431	2,266,783,478	Program
PT Bhakti Grahasa Mandiri	3,750,136,278	3,750,136,278	PT Bhakti Grahasa Mandiri
Komitmen donor	146,358,937	391,654,306	Donor commitments
Lainnya (masing-masing di bawah Rp50.000.000)	292,136,805	233,562,320	Others (each below Rp50,000,000)
Subjumlah	10,479,945,451	6,642,136,382	Subtotal
Cadangan penyisihan piutang tak tertagih	(3,750,136,278)	(6,642,136,382)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah	6,729,809,173	--	Total

Piutang program merupakan aset keuangan berupa penyaluran dana talangan dari PKBI Nasional kepada PKBI Daerah untuk membiayai operasional program di daerah, yang timbul akibat adanya keterlambatan pencairan dana dari pihak donor.

Program receivables represent financial assets arising from the distribution of bridge funding from PKBI National to PKBI Regional Offices to finance program operations, necessitated by delays in fund disbursements from donors

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang adalah cukup untuk mengurangi risiko tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment is adequate for reduce the risk of uncollectible receivables.

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6. Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka

Akun ini merupakan pembayaran di muka untuk kegiatan operasional PKBI, pelatihan, serta pengembangan staf yang dipertanggungjawabkan dalam periode 14 hari. Saldo pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024 Rp
Uang muka operasional	14,234,828,280
Penyisihan penurunan nilai uang muka	(4,718,552,543)
Jumlah	9,516,275,737

Rincian uang muka operasional pusat dan daerah pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024 Rp
Nusa Tenggara Barat	6,142,338,954
Nasional	5,665,062,433
DKI Jakarta	1,052,701,996
Jawa Timur	424,960,758
Sulawesi Tengah	333,138,081
Jawa Barat	279,450,662
Aceh	222,707,224
Riau	70,315,701
Sumatera Utara	41,606,050
Kalimantan Barat	1,280,421
Lampung	1,266,000
Sumatera Barat	--
Jambi	--
Subjumlah	14,234,828,280
Penyisihan penurunan nilai uang muka	(4,718,552,543)
Jumlah	9,516,275,737

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai uang muka pada tanggal pelaporan telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas uang muka.

6. Advances and Prepayments

This account mainly represents payment in advances for IPPA's operational activity, training and staff development subject to settlement within 14 days. The balances as of 31 December 2024 and 2023 are as follows:

	2023 Rp	
	4,718,552,543	<i>Operational advances</i>
	(4,718,552,543)	<i>Impairment of advances</i>
Total	--	Total

Details of operational advances for headquarter and regional as of 31 December 2024 and 2023 are as follows:

	2023 Rp	
	1,185,476,412	<i>West Nusa Tenggara</i>
	3,191,227,488	<i>Nasional</i>
	49,620,540	<i>DKI Jakarta</i>
	86,791,879	<i>East Java</i>
	81,635,710	<i>South Sulawesi</i>
	35,401,839	<i>West Java</i>
	48,378,534	<i>Aceh</i>
	18,323,720	<i>Riau</i>
	2,600,000	<i>North Sumatera</i>
	1,280,421	<i>West Kalimantan</i>
	--	<i>Lampung</i>
	17,491,000	<i>West Sumatera</i>
	325,000	<i>Jambi</i>
Subtotal	4,718,552,543	Subtotal
	(4,718,552,543)	<i>Allowance for advances</i>
Total	--	Total

Management believes that the allowance for impairment of advances at the reporting date is sufficient to cover losses on advances.

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. Aset Tetap - Bersih

7. Fixed Assets - Net

2024					
	Saldo awal/ Beginning balance Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan dan penyesuaian/ Deduction and adjustment Rp	Saldo akhir/ Ending balance Rp	
Biaya perolehan					Acquisition cost
Tanah	6,151,819,520	37,897,646	(5,000,000)	6,184,717,166	Land
Bangunan	21,849,389,758	--	(1,632,681,924)	20,216,707,834	Buildings
Peralatan dan perlengkapan	1,989,560,465	378,969,461	(242,609,335)	2,125,920,591	Furnitures and fixtures
Peralatan kantor	1,757,262,955	519,560,036	(53,105,440)	2,223,717,551	Office equipments
Kendaraan	3,601,894,976	222,042,536	(768,561,333)	3,055,376,179	Vehicles
Peralatan audio visual	474,752,675	17,500,242	(98,684,717)	393,568,200	Audio visual equipments
Peralatan medis	1,311,550,962	1,027,027,191	(332,637,427)	2,005,940,726	Medical equipments
Aset dalam penyelesaian	1,125,913,815	--	--	1,125,913,815	Asset under constructions
Jumlah	38,262,145,126	2,202,997,112	(3,133,280,176)	37,331,862,062	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Gedung	13,568,323,478	317,459,571	(332,334,523)	13,553,448,526	Buildings
Peralatan dan perlengkapan	1,810,941,086	75,533,314	(126,651,318)	1,759,823,082	Furnitures and fixtures
Peralatan kantor	1,557,607,340	3,057,123,057	(81,801,547)	4,532,928,850	Office equipments
Kendaraan	3,009,212,156	140,509,929	(628,307,582)	2,521,414,503	Vehicles
Peralatan audio visual	532,002,965	242,735,543	(403,130,775)	371,607,733	Audio visual equipments
Peralatan medis	1,300,718,579	873,348,275	(372,097,070)	1,801,969,784	Medical equipments
Jumlah	21,778,805,604	4,706,709,689	(1,944,322,815)	24,541,192,478	Total
Akumulasi rugi penurunan nilai	1,125,913,815	--	--	1,125,913,815	Accumulated impairment losses
Nilai tercatat	15,357,425,707			11,664,755,769	Carrying value
2023					
	Saldo awal/ Beginning balance Rp	Penambahan/ Addition Rp	Pengurangan dan penyesuaian/ Deduction and adjustment Rp	Saldo akhir/ Ending balance Rp	
Biaya perolehan					Acquisition cost
Tanah	6,312,472,166	5,000,000	(165,652,646)	6,151,819,520	Land
Bangunan	25,410,248,247	1,486,967,661	(5,047,826,150)	21,849,389,758	Buildings
Peralatan dan perlengkapan	2,386,567,413	132,674,304	(529,681,252)	1,989,560,465	Furnitures and fixtures
Peralatan kantor	2,170,019,918	23,397,000	(436,153,963)	1,757,262,955	Office equipments
Kendaraan	3,358,342,263	826,090,000	(582,537,287)	3,601,894,976	Vehicles
Peralatan audio visual	479,529,575	183,878,600	(188,655,500)	474,752,675	Audio visual equipments
Peralatan medis	2,775,459,053	--	(1,463,908,091)	1,311,550,962	Medical equipments
Aset dalam penyelesaian	1,125,913,815	--	--	1,125,913,815	Asset under constructions
Jumlah	44,018,552,450	2,658,007,565	(8,414,414,889)	38,262,145,126	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Gedung	17,395,138,329	1,001,616,761	(4,828,431,612)	13,568,323,478	Buildings
Peralatan dan perlengkapan	2,197,682,059	241,099,788	(627,840,761)	1,810,941,086	Furnitures and fixtures
Peralatan kantor	2,117,204,549	187,845,420	(747,442,629)	1,557,607,340	Office equipments
Kendaraan	2,736,283,875	868,343,281	(595,415,000)	3,009,212,156	Vehicles
Peralatan audio visual	510,959,125	148,051,726	(127,007,886)	532,002,965	Audio visual equipments
Peralatan medis	2,792,672,448	102,700,420	(1,594,654,289)	1,300,718,579	Medical equipments
Jumlah	27,749,940,385	2,549,657,396	(8,520,792,177)	21,778,805,604	Total
Akumulasi rugi penurunan nilai	--	1,125,913,815	--	1,125,913,815	Accumulated impairment losses
Nilai tercatat	71,768,492,835			15,357,425,707	Carrying value

Beban penyusutan yang dibebankan pada laporan penghasilan komprehensif untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.601.898.995 dan Rp1.833.204.556.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perkumpulan mengidentifikasi adanya penurunan nilai atas aset dalam

Depreciation expenses charged to the statements of comprehensive income for the years ended 31 December 2024 and 2023 Rp4,601,898,995 and Rp1,833,204,556.

As at 31 December 2024 and 2023, the Federation recognize a decrease in amount of assets under constructions. The

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

penyelesaian. Nilai terpulihkan asset tersebut dianggap sebesar nilai wajar karena manajemen berkeyakinan bahwa nilai pakai untuk asset tersebut mendekati nilai wajar aset tetap.

recoverable amount of these assets is considered to be their fair value due to management belief that the value in use for these assets approximates the fair value of the fixed assets.

8. Aset Lain-lain

	2024 Rp
PT Bank Mega Tbk	14,000,000,000
Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri	5,000,000,000
Koperasi KBPM Nusantara	5,690,000,000
Subjumlah	24,690,000,000
Penyisihan penurunan nilai investasi	(10,690,000,000)
Jumlah	14,000,000,000

Koperasi Simpan Pinjam ("KSP") Makmur Mandiri

Pada tanggal 27 Januari 2021, PKBI menempatkan investasi di KSP Makmur Mandiri dengan imbal hasil yang diperoleh sebesar 12% per tahun.

PKBI telah menerima pengembalian dana atas investasi di KSP Makmur sebesar Rp5.000.000.000 pada tanggal 8 Februari 2023.

Berdasarkan sertifikat simpanan berjangka pada tanggal 7 Juni 2023, PKBI memiliki investasi di KSP Makmur Mandiri dengan imbal hasil yang diperoleh sebesar 11% per tahun dengan jangka waktu selama 24 bulan.

Manajemen telah melakukan penyisihan atas penurunan nilai investasi sebesar 100% atas investasi pada KSP Makmur Mandiri.

PT Bank Mega Tbk

Pada tanggal 30 Juni 2024, PKBI menempatkan investasi di PT Bank Mega Tbk berupa Syailendra Dana Kas ("SDK") dengan imbal hasil yang diperoleh sebesar 3,50% - 3,52% per tahun dengan jangka waktu selama 12 bulan.

Pada tanggal 31 Oktober 2024, PKBI menempatkan investasi di PT Bank Mega Tbk berupa Trimegah Fixed Income Plan dengan imbal hasil yang diperoleh sebesar 6,5% per tahun dengan jangka waktu selama 12 bulan.

8. Other Assets

	2023 Rp	
PT Bank Mega Tbk	13,690,000,000	PT Bank Mega Tbk
Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri	5,000,000,000	Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri
Koperasi KBPM Nusantara	5,690,000,000	Koperasi KBPM Nusantara
Subtotal	24,380,000,000	Subtotal
Allowance for impairment of investment	(10,690,000,000)	Allowance for impairment of investment
Total	13,690,000,000	Total

Koperasi Simpan Pinjam ("KSP") Makmur Mandiri

On 27 January 2021, IPPA invested in KSP Makmur Mandiri with a return of 12% per annum.

IPPA has received return on investment in KSP Mandiri Makmur amounting to Rp5,000,000,000 on 8 February 2023.

Based on investment certificate on 7 June 2023, IPPA has an investment in KSP Makmur Mandiri with a return of 11% per annum with a period of 24 months.

Management has made a 100% provision for impairment of investment for investments in KSP Makmur Mandiri.

PT Bank Mega Tbk

On 30 June 2024, IPPA invested in PT Bank Mega Tbk in the form of Syailendra Dana Kas ("SDK") with a return of 3.50% - 3.52% per annum with a period of 12 months.

On 31 October 2024, IPPA invested in PT Bank Mega Tbk in the form of Trimegah Fixed Income Plan with a return of 6.5% per annum with a period of 12 months.

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 31 Oktober 2024, PKBI menempatkan investasi di PT Bank Mega Tbk berupa TRIM Dana Tetap – 2 dan Mega Investa dengan imbal hasil yang diperoleh sebesar 7,25% - 7,50% per tahun dengan jangka waktu selama 12 bulan.

Koperasi KBPM Nusantara

Pada tanggal 27 Januari 2021, PKBI menempatkan investasi di Koperasi KBPM Nusantara dengan imbal hasil yang diperoleh sebesar 12% per tahun. Jangka waktu atas investasi tersebut selama 24 bulan, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan 27 Januari 2023.

Sejak bulan September 2021 sampai dengan tanggal penyelesaian audit atas laporan keuangan, PKBI tidak pernah menerima imbal hasil sesuai dengan yang disepakati. Atas kondisi tersebut, manajemen PKBI telah mengirimkan beberapa kali surat konfirmasi dengan surat terakhir pada bulan September 2022, kepada manajemen Koperasi KBPM Nusantara untuk mempertanyakan perihal penundaan pembagian imbal hasil kepada PKBI. Berdasarkan respon konfirmasi yang diterima, manajemen Koperasi KBPM Nusantara meminta kelonggaran waktu kepada manajemen PKBI untuk membayarkan imbal hasil yang tertunggak bersamaan dengan pengembalian pokok investasi pada saat jatuh tempo.

Pada tanggal 19 Januari 2022, manajemen PKBI dan Koperasi KBPM Nusantara menandatangani surat pernyataan penyelesaian simpanan PKBI pada Koperasi KBPM Nusantara yang menyatakan bahwa manajemen Koperasi KBPM Nusantara akan menyelesaikan pengembalian pokok dan pembayaran seluruh imbal hasil dengan menyerahkan aset milik Koperasi KBPM Nusantara yang terdiri dari tanah dan bangunan berlokasi di Ciomas dan Subang.

Namun, sampai dengan tanggal jatuh tempo penempatan investasi, PKBI belum menerima pengembalian pokok maupun pembayaran seluruh imbal hasil sebagaimana yang dinyatakan dalam surat pernyataan penyelesaian.

On 31 October 2024, IPPA invested in PT Bank Mega Tbk in the form of TRIM Dana Tetap – 2 and Mega Investa with a return of 7.25% - 7.50% per annum with a period of 12 months.

Koperasi KBPM Nusantara

On 27 January 2021, the IPPA invested in Koperasi KBPM Nusantara with a return of 12% per annum. The investment period is 24 months, starting from 27 January 2021 to 27 January 2023.

From September 2021 until the completion of the audit of the financial statements, IPPA has never received the agreed return. Due to this condition, IPPA management sent several confirmation letters, the last one in September 2022, to Koperasi KBPM Nusantara management to question the delay in distributing return to IPPA. Based on the confirmation responses received, Koperasi KBPM Nusantara management requested IPPA management for more time to pay the outstanding interest as well as repay the investment principal when due.

On 19 January 2022, IPPA and Koperasi KBPM Nusantara management signed a statement on the settlement of IPPA's investment with Koperasi KBPM Nusantara, stating that Koperasi KBPM Nusantara management will complete the repayment of the principal and pay all the return by selling the assets belonging to Koperasi KBPM Nusantara, including land and buildings located in Ciomas and Subang.

However, up to the maturity date of the investment, PKBI has not received the principal repayment or all of the returns as stated in the settlement statement.

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Sesuai perjanjian tanggal 20 Juni 2023 No. 048/KBPM/SP/VI/2023, pihak PKBI masih dalam proses hukum pengambilan alihan aset, dan terkait penyelesaian pengembalian simpanan dana PKBI di Koperasi KBPM Nusantara akan diberi waktu hingga sebelum akhir tahun.

PKBI telah mengirimkan beberapa surat pengingat penyelesaian investasi PKBI di Koperasi KBPM Nusantara, dengan surat terakhir pada tanggal 25 Agustus 2023 untuk mengembalikan investasi dengan menyerahkan aset milik Koperasi KBPM Nusantara seperti yang telah disepakati didalam perjanjian.

Berdasarkan konfirmasi yang diterima oleh PKBI pada tanggal 30 Oktober 2023, manajemen Koperasi KBPM Nusantara meminta perpanjangan waktu selama 6 (enam) bulan untuk membayarkan imbal hasil yang tertunggak beserta pengembalian pokok investasi. Sampai tanggal pelaporan, belum ada realisasi atas penyelesaian investasi PKBI di Koperasi KBPM Nusantara.

Manajemen telah melakukan penyisihan atas penurunan nilai investasi sebesar 100% atas investasi pada Koperasi KBPM Nusantara.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai investasi pada tanggal pelaporan telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas nilai investasi.

Pursuant to agreement dated 20 June 2023 No. 048/KBPM/SP/VI/2023, which Koperasi KBPM Nusantara is still in the legal process taking over the assets and completing the repayment of the IPPA's investment, the delay will be implemented until the end of 2023.

IPPA has sent several reminder letters for settlement IPPA's investment in Koperasi KBPM Nusantara, the latest letter dated 25 August 2023 to repay the investment through the handover of assets belonging to the Koperasi KBPM Nusantara as agreed in the agreement.

Based on the confirmation received by IPPA on 30 October 2023, the management of Koperasi KBPM Nusantara requested an extension of 6 (six) months to pay the remaining interest as well as repay the principal investment. As of the date of completion of the financial statements, the settlement of IPPA's investment in Koperasi KBPM Nusantara has not been made.

Management has made a 100% provision for impairment of investment for investments in Koperasi KBPM Nusantara.

Management believes that the allowance for impairment of investment at the reporting date is sufficient to cover losses on investment.

9. Investasi pada Entitas Anak

Perkumpulan memiliki investasi pada entitas anak sebagai berikut:

	2024 Rp
PT Adhiwarga Mandiri Sejahtera	270,000,000
PT Adicita Swara Publika	11,875,000
Jumlah	281,875,000

9. Investment to Subsidiaries

The Federation has investment to subsidiaries, are as follows:

	2023 Rp	
	270,000,000	PT Adhiwarga Mandiri Sejahtera
	11,875,000	PT Adicita Swara Publika
	281,875,000	Total

Nama Perusahaan/ The Company's Name	Tempat Kedudukan/ Location	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Bidang Usaha/ Type of Business	Mulai Kegiatan Komersial/ Start of Commercial Operation	Jumlah Aset/ Total Assets Rp 2024
PT Adhiwarga Mandiri Sejahtera	Yogyakarta	90.00%	aktivitas praktik dokter, layanan penunjang kesehatan/ medical practice services, and other supporting healthcare services	Beroperasi/ Commenced Operations	469,583,904
PT Adicita Swara Publika	Yogyakarta	95.00%	layanan terkait multimedia dan periklanan/ multimedia-related services and advertising services	Beroperasi/ Commenced Operations	257,465,308

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Perkumpulan telah melakukan penyertaan modal kepada PT Adhiwarga Mandiri Sejahtera (AWMS) dan PT Adicita Swara Publika (ASP) masing-masing sebesar Rp469.583.904 dan Rp257.465.308.

The Federation has paid-up capital amounting to in PT Adhiwarga Mandiri Sejahtera (AWMS) and PT Adicita Swara Publika (ASP) are Rp469,583,904 and Rp257,465,308, respectively.

10. Biaya yang Masih Harus Dibayar

10. Accruals

	2024 Rp	2023 Rp	
Nasional	3,757,350,453	1,983,996,104	Nasional
DKI Jakarta	253,034,289	11,191,853	DKI Jakarta
Bali	247,250,000	--	Bali
Papua	50,100,000	--	Papua
Nusa Tenggara Barat	33,861,512	750,000	West Nusa Tenggara
Jawa Tengah	13,898,660	12,862,500	Central Java
Jawa Barat	6,668,107	96,357,173	Jawa Barat
Lampung	4,500,000	--	Lampung
Jambi	4,150,000	467,879	Jambi
Aceh	3,500,028	--	Aceh
Jawa Timur	--	--	Jawa Timur
Riau	--	112,635,000	Riau
Nusa Tenggara Timur	--	5,500,000	East Nusa Tenggara
Sumatera Barat	--	3,478,000	West Sumatera
Bengkulu	--	1,500,000	Bengkulu
Kalimantan Timur	--	1,500,000	East Kalimantan
Kalimantan Tengah	--	1,000,000	Central Kalimantan
Jumlah	4,374,313,049	2,231,238,509	Total

11. Perpajakan

11. Taxation

a. Pajak Dibayar Dimuka

a. Prepaid Taxes

	2024 Rp	2023 Rp	
Pasal 4(2)	4,000,000	--	Article 4(2)
Pasal 23	5,029,550	--	Article 23
Jumlah	9,029,550	--	Total

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	2024 Rp	2023 Rp	
Pasal 21	1,377,600,082	871,387,105	Article 21
Pasal 23	1,588,367	106,085,974	Article 23
Pasal 4(2)	--	102,609,700	Article 4(2)
Jumlah	1,379,188,449	1,080,082,779	Total

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. Pendapatan Ditangguhkan

12. Deferred Revenues

	2024 Rp	2023 Rp	
Hibah IPPF			IPPF Grants
Grant Canada ("GAC")	215,131,440	8,032,874,881	Grant Canada ("GAC")
Subjumlah	215,131,440	8,032,874,881	Subtotal
Hibah Non-IPPF			Non-IPPF Grants
Indonesia AIDS Coalition	4,229,244,879	--	Indonesia AIDS Coalition
The Global Fund - New Funding Model ("GF - NFM")	2,378,405,338	354,948,716	The Global Fund - New Funding Model ("GF - NFM")
United Nations International Children's Emergency Fund ("UNICEF")	983,728,633	160,901,609	United Nations International Children's Emergency Fund ("UNICEF")
Pertamina Hulu Rokan	346,803,570	--	Pertamina Hulu Rokan
Lain-lain (Dibawah Rp300 Juta)	1,205,256,945	28,005,826	Others (Each Below Rp300 Million)
Subjumlah	9,143,439,365	543,856,151	Subtotal
Jumlah	9,358,570,805	8,576,731,032	Total

13. Dana Titipan

13. Fund Deposits

Akun ini mencerminkan penerimaan dana yang bersifat titipan dari donor program kepada PKBI Nasional dan Daerah, di mana entitas bertindak sebagai pengelola dana sebelum direalisasikan untuk kegiatan program terkait

This account reflects fund receipts from program donors held in trust by IPPA National and Regional Offices, where the entity acts as a fund manager prior to the realization for relevant program activities.

	2024 Rp	2023 Rp	
Tanpa Pembatasan			Without Restrictions
Nasional	10,275,018,029	1,723,177,149	Nasional
Nusa Tenggara Barat	359,317,422	--	West Nusa Tenggara
Sumatera Barat	48,298,776	15,647,000	West Sumatera
Kepulauan Riau	47,078,612	5,354,132	Riau Archipelago
Jawa Barat	46,909,643	278,703,605	West Java
Aceh	32,565,460	19,264,140	Aceh
Sulawesi Utara	23,000,000	--	North Sulawesi
Sumatera Utara	17,333,530	1,050,000	North Sumatera
Nusa Tenggara Timur	17,080,000	--	East Nusa Tenggara
Sulawesi Tengah	13,000,000	12,000,000	Central Sulawesi
Lampung	11,231,600	--	Lampung
D I Yogyakarta	10,026,382	9,508,060	D I Yogyakarta

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
Jawa Tengah	7,500,000	--	Jawa Tengah
Papua	4,000,000	--	Papua
Bengkulu	3,923,350	196,923	Bengkulu
Sulawesi Selatan	3,337,520	3,337,520	South Sulawesi
Riau	1,843,176	1,500	Riau
Kalimantan Barat	1,060,000	9,940,000	West Kalimantan
Bali	--	33,724,723	Bali
Jawa Timur	--	5,215,922	East Java
DKI Jakarta	--	119,292,062	DKI Jakarta
Subjumlah	10,922,523,500	2,236,412,736	Subtotal
Dengan Pembatasan			With Restrictions
Nasional	785,775,530	9,545,156	Nasional
Jawa Barat	201,595,827	125,000	West Java
Kepulauan Riau	17,808,857	--	Riau Archipelago
Jambi	11,392,692	1,500,000	Jambi
Aceh	9,168,119	10,691,500	Aceh
Kalimantan Barat	8,487,812	1,000,000	West Kalimantan
Nusa Tenggara Barat	6,315,970	--	West Nusa Tenggara
Sumatera Utara	1,999,001	--	North Sumatera
Jawa Timur	857,993	--	East Java
Lampung	407,343	6,550,000	Lampung
Bengkulu	284,096	--	Bengkulu
Sulawesi Tengah	248,333	--	Central Sulawesi
Sulawesi Utara	--	1,000,000	North Sulawesi
Papua	--	18,837,500	Papua
Riau	--	1,000,000	Riau
D I Yogyakarta	--	8,071,336	D I Yogyakarta
Subjumlah	1,044,341,573	58,320,492	Subtotal
Jumlah	11,966,865,073	2,294,733,228	Total

14. Imbalan Pascakerja

PKBI menghitung imbalan pascakerja berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 6/2023 (UU Ciptaker No.6/2023) dan Pedoman Ketenagakerjaan yang berlaku untuk tahun 31 Desember 2024 dan 2023. Jumlah pegawai yang berhak atas imbalan tersebut berjumlah 39 dan 41 orang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.

Perhitungan imbalan kerja tahun 2024 dan 2023 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Azwir Arifin dan Rekan, aktuaris independen yang dihitung dengan menggunakan metode Projected Unit Credit.

14. Post-Employment Benefit Liabilities

The IPPA calculated post-employment benefit liabilities in accordance with Undang-Undang Cipta Kerja No. 6/2023 (UU Ciptaker No.6/2023) and Pedoman Ketenagakerjaan as of 31 December 2024 and 2023. The number of employees entitled to the benefits is 39 and 41 employees as are 31 December 2024 and 2023.

The Post-employment benefits computation in 2024 and 2023 was calculated by Actuarial Consultant Azwir Arifin dan Rekan, an independent firm of actuaries which were calculated using the Projected Unit Credit.

	2024	2023	
Tingkat diskonto	6.88% - 7.14%	6.37% - 7.10%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	7.00%	7.00%	Salary increases rate
Tingkat kematian	TMI IV - 2019	TMI IV - 2019	Mortality rate
Usia pensiun normal	57 tahun/ years	57 tahun/ years	Normal retirement age

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Cadangan imbalan pascakerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan sehubungan dengan imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

Post-employment benefit liabilities recognized in the statement of financial position related to employment benefit are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	3,733,315,231	3,017,107,109	Present Value of Defined Benefit Obligations
Liabilitas Imbalan Pascakerja	3,733,315,231	3,017,107,109	Employee Benefit Liabilities

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Movements in the liability for post-employment benefits recognized in the statement of financial position are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Liabilitas pada Awal Tahun	3,017,107,109	2,447,155,752	Beginning balance of Liability
Beban Imbalan Kerja	671,810,763	662,393,648	Employee Benefit Expense
Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain	86,746,486	(74,712,555)	Other Comprehensive (Income) Expense
Pembayaran Imbalan Kerja	(42,349,127)	(17,729,736)	Employee Benefit payment
Liabilitas pada Akhir Tahun	3,733,315,231	3,017,107,109	Ending Balance of Liabilities

Beban imbalan pascakerja yang diakui dalam laporan penghasilan komprehensif adalah sebagai berikut:

The details of expense recognized in the statement of comprehensive income are as follows::

	2024 Rp	2023 Rp	
Beban jasa kini	474,262,375	497,263,918	Current service cost
Beban bunga	197,548,388	165,129,730	Interest on obligation
Jumlah	671,810,763	662,393,648	Total

Mutasi beban (pendapatan) komprehensif Adalah sebagai berikut::

The movement of comprehensive (income) expense are as follows::

	2024 Rp	2023 Rp	
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial - Kewajiban	86,746,486	(74,712,555)	Actuarial (Gain) Losses - Obligation
Jumlah	86,746,486	(74,712,555)	Total

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Dampak terhadap nilai kewajiban imbalan pasti dari kemungkinan perubahan yang wajar terhadap satu asumsi aktuarial pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, disajikan pada tabel di bawah ini:

The impact to the value of the defined benefit obligation of a reasonably possible change to one actuarial assumption as of 31 December 2024 and 2023, are presented in the table below:

2024				
Dampak pada kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation				
Perubahan asumsi/ Change in assumption %	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption Rp	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption Rp		
Tingkat diskonto	1.00%	3,528,269,524	3,961,197,097	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1.00%	3,971,936,896	3,515,600,606	Salary increase rate
2023				
Dampak pada kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation				
Perubahan asumsi/ Change in assumption %	Kenaikan asumsi/ Increase in assumption Rp	Penurunan asumsi/ Decrease in assumption Rp		
Tingkat diskonto	1.00%	2,825,374,169	3,231,053,003	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	1.00%	3,240,098,105	2,814,538,910	Salary increase rate

15. Aset Neto

Para Donor PKBI telah menempatkan pembatasan pada penggunaan kontribusi mereka dan dengan demikian aset neto PKBI diklasifikasikan sebagai terikat dan tidak terikat. Akun-akun ini mengacu pada sumber daya yang masuk dan sumber daya yang dikeluarkan yang mempengaruhi perubahan aset neto PKBI pada 31 Desember 2024 dan 2023.

15. Net Assets

The Donors of The IPPA have placed restriction on the use of their contributions and thus IPPA's net assets are classified as restricted and unrestricted. These accounts refer to the incoming resources and resources expended which affect the changes of IPPA's net assets in 31 December 2024 and 2023.

	2024 Rp	2023 Rp	
Tanpa Pembatasan dari Sumber Daya	34,002,947,451	43,585,716,561	Without Restriction from Donors
Dengan Pembatasan dari Sumber Daya	479,740,849	(6,720,996,987)	With Restriction from Donors
Jumlah	34,482,688,300	36,864,719,574	Total

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. Pendapatan	16. Revenues	
	2024 Rp	2023 Rp
Tanpa Pembatasan		
IPPF	10,143,041,008	7,088,130,900
Klinik	5,536,237,477	6,010,298,609
Fundraising	3,676,794,451	11,412,328,178
Wisma	426,296,197	280,662,533
Training Center	87,138,993	57,840,443
Subjumlah	19,869,508,126	24,849,260,663
Pendapatan lainnya	2,760,917	177,191,357
Subjumlah	19,872,269,043	25,026,452,020
Dengan Pembatasan		
Coalition ("IAC")	41,738,517,034	18,236,908,117
Spiritia	40,583,676,415	43,774,330,488
IPPF - The Department of Foreign Agency and Trade ("DFAT") Respond International AIDS	12,104,086,308	19,947,249,211
United Nations International Children's Emergency Fund - UNICEF	7,975,145,157	2,183,039,198
The Global Fund Tuberculosis - Konsorsium Penabulu	7,115,330,829	10,659,078,465
Cowater	6,258,216,153	9,924,548,845
PT Pertamina (Persero)	1,983,310,714	1,562,218,272
IPPF	1,972,405,725	618,409,875
United Nations Population Fund - UNFPA	1,807,672,085	391,272,940
Ford Foundation	1,045,117,905	1,528,165,590
Save The Children ("STC")	1,002,338,671	830,546,106
UNICEF - Emergency funds	660,032,990	822,301,481
IPPF Stream 2 Opportunity Grant	473,265,041	--
IPPF - Pre-Exposure Profilaksis ("PrEP")	466,362,122	85,158,000
Yayasan Inisiatif Perubahan Akses menuju Sehat Indonesia ("IPAS")	451,889,389	167,525,040
PT Insight Investments Management	367,927,816	--
IPPF - Humanitarian	348,856,699	2,958,926,092
DT Global Asia Pasifik	333,080,561	700,576,539
Rise Foundation	266,918,525	--
Youth Interfaith Forum on Sexuality ("YIFos")	248,485,347	134,535,637
PT Tirta Investama	227,816,214	258,523,050
Embassy Kingdom of Netherland ("EKN")	188,248,845	361,391,805
Irlandia Aid	155,281,120	166,226,500
Medicare Pro Asia	121,694,870	--

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
The International Organization for Migration ("IOM")	103,598,260	94,762,690	The International Organization for Migration ("IOM")
Bali Children Foundation	23,815,686	--	Bali Children Foundation
Yayasan Pelita Ilmu ("YPI")	--	4,878,774,724	Yayasan Pelita Ilmu ("YPI")
GF - NFM	--	2,283,895,271	GF - NFM
UNICEF - Respons Nusa Tenggara Barat (Covid 19)	--	2,050,971,748	UNICEF - Respons West Nusa Tenggara (Covid 19)
United Nations Population Fund ("UNFPA") - Leave No One Behind (LNOB)	--	1,217,034,144	United Nations Population Fund ("UNFPA") - Leave No One Behind (LNOB)
United States Agency for International Development II ("USAID II")	--	782,328,291	United States Agency for International Development II ("USAID II")
Hennes and Mauritz ("H&M")	--	118,897,402	Hennes and Mauritz ("H&M")
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	--	63,750,000	Health Ministry of Republic Indonesia
Yayasan Gemilang Sehat Indonesia	--	14,081,686	Yayasan Gemilang Sehat Indonesia
Australian Volunteers Program ("AVP")	--	4,664,500	Australian Volunteers Program ("AVP")
Subjumlah	128,023,090,481	126,820,091,707	Subtotal
Jumlah	147,895,359,524	151,846,543,727	Total

17. Beban

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia memiliki 6 kelompok strategi beban operasional, sebagai berikut:

1. Strategi 1 merupakan kelompok beban dengan layanan kesehatan seksual dan reproduksi;
2. Strategi 2 merupakan kelompok beban dengan layanan program anak, remaja dan gerakan kesehatan nasional;
3. Strategi 3 merupakan kelompok beban dengan layanan penanggulangan HIV, AIDS dan kampanye penghapusan stigma dan diskriminasi berbasis masyarakat;
4. Strategi 4 merupakan kelompok beban terkait advokasi untuk pemenuhan hak-hak seksual dan reproduksi;
5. Strategi 5 merupakan kelompok beban sehubungan dengan pengelolaan pengetahuan dan *monitoring* dan *evaluation*, peningkatan kapasitas organisasi dan manajemen, pusat informasi, edukasi, konseling Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), dan mobilisasi sumber dana;
6. Strategi 6 merupakan kelompok beban administrasi umum.

17. Expenses

Indonesian Planned Parenthood Association has six operational strategy, as follows:

1. *Strategy 1 is group of expenses related to sexual and reproductive Health Services;*
2. *Strategy 2 is a group of expenses related to children and youth programmes and national health movements;*
3. *Strategy 3 is a group of expenses related to HIV and AIDS prevention and community-based stigma and discrimination limination campaign;*
4. *Strategy 4 is a group of expenses related to advocacy for the fulfillment of sexual and reproductive rights;*
5. *Strategy 5 is a group of responsibilities related to knowledge management and monitoring and evaluation, organizational and management capacity building, information centers, education, Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR), and mobilization of funding resource mobilization;*
6. *Strategy 6 is a group of administrative general responsibilities.*

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2024							
(Strategi 1)/ (Strategy 1)	(Strategi 2)/ (Strategy 2)	(Strategi 3)/ (Strategy 3)	(Strategi 4)/ (Strategy 4)	(Strategi 5)/ (Strategy 5)	(Strategi 6)/ (Strategy 6)	Jumlah/ Total	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Gaji dan tunjangan	2,770,328,946	2,225,509,616	18,999,253,974	327,268,386	75,720,869	5,632,476,978	Salaries and allowances
Perjalanan dinas	177,970,065	139,060,074	1,162,145,903	5,020,202	—	1,636,220,954	Business travelling
Jasa profesional	2,852,418,468	887,008,731	63,805,482,713	331,730,351	10,016,500	10,893,805,321	Professional fees
Cetak dan alat tulis	671,810,763	—	2,900,309,874	—	—	23,580,000	Printing and stationaries
Penyusutan	594,316,038	438,195,500	2,648,423,484	147,802,957	—	773,161,016	Depreciation
Obat, peralatan, dan bahan	29,146,078	3,048,609	376,590,218	7,717,000	—	87,126,697	Medicines, equipments, and materials
Imbalan pascakerja	98,208,700	26,969,200	983,244,778	—	—	25,035,501	Employee benefits
Komunikasi	—	43,483,790	—	—	—	235,945,511	Communication
Biaya lain-lain	1,966,522,675	860,001,187	22,582,402,588	40,424,852	13,865,962	4,339,562,500	Other expenses
Jumlah	9,160,721,733	4,623,276,707	113,457,853,532	99,603,331	22,162,718,234	150,364,137,285	Total

2023							
(Strategi 1)/ (Strategy 1)	(Strategi 2)/ (Strategy 2)	(Strategi 3)/ (Strategy 3)	(Strategi 4)/ (Strategy 4)	(Strategi 5)/ (Strategy 5)	(Strategi 6)/ (Strategy 6)	Jumlah/ Total	
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Gaji dan tunjangan	6,709,067,063	1,452,502,613	65,371,396,454	488,626,250	1,265,783,464	10,178,763,524	Salaries and allowances
Perjalanan dinas	4,150,455,828	797,283,105	30,213,287,611	98,279,000	2,746,451,162	401,997,506	Business travelling
Jasa profesional	654,112,559	239,531,799	1,418,631,865	107,255,750	394,636,334	166,360,714	Professional fees
Cetak dan alat tulis	271,310,627	206,418,010	1,359,292,607	10,036,750	—	102,873,184	Printing and stationaries
Penyusutan	—	—	—	—	—	1,833,204,556	Depreciation
Obat, peralatan, dan bahan	11,186,725	—	1,370,319,662	—	3,542,750	6,253,257	Medicines, equipments, and materials
Imbalan pascakerja	—	—	57,633,216	—	—	662,393,647	Employee benefits
Komunikasi	16,936,616	65,634,226	293,172,619	6,632,507	258,466,288	41,248,121	Communication
Biaya lain-lain	2,112,365,303	1,194,838,244	26,306,729,005	110,757,097	690,556,361	8,524,803,035	Other expenses
Jumlah	13,925,434,721	3,956,207,997	126,390,463,039	821,587,354	5,708,186,922	21,917,897,544	Total

**18. Instrumen Keuangan, Manajemen Risiko
Keuangan dan Aset Neto**

Mengingat bahwa penerapan praktik manajemen risiko yang baik dapat mendukung kinerja PKBI, maka manajemen risiko selalu menjadi elemen pendukung penting bagi PKBI dalam menjalankan kegiatannya.

PKBI memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas instrumen keuangan seperti: risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko nilai tukar mata uang asing.

a. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul dari kemungkinan PKBI mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Risiko ini memiliki tingkat keterjadian yang rendah karena PKBI hanya memberikan komitmen jika PKBI telah memperoleh persetujuan dan komitmen dari para pemberi sumbangan.

**18. Financial Instruments, Financial and
Statement of Changes in Net Assets Risk
Management**

Considering that a good risk management practice implementation could better support the performance of IPPA, hence the risk management would always be an important element to support IPPA in running its business.

IPPA has exposure to the following risks from financial instruments such as: credit risk, liquidity risk, and foreign currency risk.

a. Liquidity risk

Liquidity risk arise from the possibility that IPPA encounter difficulty to meet obligations as they become due. This risk considered low since all commitments are made when approval has been given from Donors.

2024			
Jumlah tercatat/ Carrying amount Rp	Kurang dari 1 tahun/ Not later than 1 year Rp		
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Biaya yang masih harus dibayar	4,374,313,049	4,374,313,049	Accrual expenses
Utang lain-lain	288,403,121	288,403,121	Other payables
Dana titipan	11,966,865,073	11,966,865,073	Fund deposits
Pendapatan Ditangguhkan	9,358,570,805	9,358,570,805	Deferred Revenues
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	3,733,315,231	3,733,315,231	Present Value of Defined Benefit Obligations
Jumlah	29,721,467,279	29,721,467,279	Total

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2023		
	Jumlah tercatat/ Carrying amount Rp	Kurang dari 1 tahun/ Not later than 1 year Rp	
Liabilitas keuangan			Financial liabilities
Biaya yang masih harus dibayar	2,231,238,509	2,231,238,509	Accrual expenses
Utang lain-lain	411,798,183	411,798,183	Other payables
Dana titipan	2,294,733,228	2,294,733,228	Fund deposits
Pendapatan Ditangguhkan	8,576,731,032	8,576,731,032	Deferred Revenues
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	3,017,107,109	3,017,107,109	Present Value of Defined Benefit Obligations
Jumlah	16,531,608,061	16,531,608,061	Total

**19. Litigasi dan Peristiwa Setelah Tanggal
Pelaporan**

a. Penggusuran kantor pusat PKBI Nasional

PKBI memiliki sengketa hukum dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebelumnya Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengenai status kepemilikan atas sebidang tanah yang menjadi lokasi Kantor Pusat PKBI yang terletak di Jalan Hang Jebat III/F3, Jakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.Ad.7/2/34/70 tanggal 25 April 1970, PKBI mendapat ijin atas penunjukan peruntukan atau penggunaan tanah Kementerian Kesehatan seluas 5.400 m2 di tanah yang menjadi lokasi Kantor Pusat PKBI yang terletak di Jalan Hang Jebat III/F3, Jakarta. Selain itu, PKBI diwajibkan untuk membangun gedung pendidikan dan menyelesaikan hak tanahnya terkait penggunaan tanah ke instansi agraria.

Menteri Kesehatan melalui surat No.59/ab/B.VII/69 tanggal 10 Februari 1969 menyatakan telah menyetujui permohonan untuk menyerahkan tanah yang terletak di Jalan Hang Jebat III/F3 kepada Gubernur DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan dan diserahkan kepada PKBI.

Kepala Kantor Agraria Jakarta Selatan dalam suratnya No.67/TU/Ads/1970 tanggal 1 Juli 1970 menerangkan bahwa PKBI dapat diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, demikian pula seterusnya.

**19. Litigation and Events After Reporting
Date**

a. Eviction of PKBI National Head Office

IPPA has a legal dispute with the Ministry of Health of the Republic of Indonesia formerly the Department of Health of the Republic of Indonesia regarding the status of ownership over a plot of land where IPPA's Head Office is located at Jalan Hang Jebat III/F3, Jakarta.

Based on the Decree of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta No.Ad.7/2/34/70 dated 25 April 1970, IPPA received permission for the designation or use of the Ministry of Health's land area of 5,400 m2 on the land that is the location of the PKBI Head Office located on Jalan Hang Jebat III/F3, Jakarta. In addition, IPPA was required to build educational buildings and complete its land rights related to land use to the agrarian affairs.

The Minister of Health through a letter No.59/ab/B.VII/69 dated 10 February 1969 stated an approval for the application to hand over land located on Jalan Hang Jebat III/F3 to the Governor of DKI Jakarta which was then used and handed over to IPPA.

The Head of the South Jakarta Agrarian Affairs in the letter No.67/TU/Ads/1970 dated 1 July 1970 explained that IPPA could be granted Building Use Rights (HGB) for 30 years and could be extended for the same period, and so on.

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)*

PKBI kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas tanah kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dengan surat No.1003/Ak4.01/96 tertanggal 10 Juli 1996 dan permohonan pengukuran tanah dengan surat No.1.711.2/1060/S/96 tertanggal 11 April 1996.

Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan dalam suratnya tanggal 6 November 1996 No.1.711.2/3777/S/1996 perihal Permohonan Hak Pakai atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang terletak di Jl. Hang Jebat III Kelurahan Gunung menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan sudah mengajukan permohonan hak pakai pada tanggal 6 Maret 1996 dan PKBI juga mengajukan permohonan haknya. Kemudian Kantor Pertanahan Jakarta Selatan mengusulkan untuk dilakukan musyawarah bersama antara kedua belah pihak terkait.

Kementerian Kesehatan dalam suratnya tanggal 4 Februari 1997 No.PL.01.SJ.V.1403 melakukan pemblokiran dan menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh PKBI adalah merupakan hak dari Kementerian Kesehatan dan telah terdaftar dalam Daftar Inventaris Aset Negara di Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.S-1086/A/2001 tanggal 20 Maret 2001, Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai ("SHP") Tanah No. 374/Gunung atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pada tanggal 14 April 2004, Pengurus Nasional telah mengirimkan surat kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk meminta ijin menggunakan tanah untuk waktu terbatas selama PKBI itu ada dan menjalankan aktivitasnya. Salinan surat ini juga dikirim kepada Presiden Republik Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur DKI Jakarta. Pada tanggal 8 April 2005, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui surat No.PL.00.SJ.01.0367 telah mengizinkan pemanfaatan lahan untuk 2 (dua) tahun dan subjek untuk pembaharuan.

IPPA then submitted an application to obtain land rights to the Regional Office of the National Land Agency through the South Jakarta Land Agency with a letter No.1003/Ak4.01/96 dated 10 July 1996 and an application for land measurement with letter No.1.711.2/1060/S/96 dated 11 April 1996.

The Head of the South Jakarta Land Agency in a letter dated 6 November 1996 No.1.711.2/3777/S/1996 regarding the Application for Right of Use on behalf of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia located on Jl. Hang Jebat III, Gunung District, stated that the Ministry of Health had submitted an application for right of use on 6 March 1996, and IPPA had also submitted an application for its rights. Then the South Jakarta Land Agency proposed a further discussion to be held between the two parties concerned.

The Ministry of Health in its letter dated 4 February 1997 No.PL.01.SJ.V.1403 did the blocking and stated that the land used by IPPA was the right of the Ministry of Health and had been registered in the State Asset Inventory List at the Ministry of Finance.

Based on the Letter from Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No.S-1086/A/2001 dated 20 March 2001, the National Land Agency has already issued the Right to Use Certificate ("SHP") No. 374/Gunung under the name of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia.

On 14 April 2004, the National Board had sent a letter to the Ministry of Health of the Republic of Indonesia requesting to utilize the land for unlimited time as long as IPPA exists and carries on its activities. The copy of this letter was also sent to the President of the Republic of Indonesia, the National Land Agency, the Minister of Home Agency, and the Governor of DKI Jakarta. On 8 April 2005, the Ministry of Health of the Republic of Indonesia through its letter No.PL.00.SJ.01.0367 has permitted the utilization of the land for 2 (two) years and subject for renewal.

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan surat No.PL.00.SJ.III.0218 tanggal 1 Maret 2006, Kementerian Kesehatan meminta agar PKBI segera mengajukan permohonan sewa.

PKBI menanggapi surat dari Kementerian Kesehatan pada tanggal 23 Februari 2007 dengan surat No.0154/Ak4.01/2007 yang menyatakan bahwa secara de facto PKBI telah menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut. Kemudian PKBI meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk mempertimbangkan agar tidak menuntut tanah yang dipergunakan oleh PKBI, dan mendukung pemanfaatan semaksimal mungkin oleh PKBI serta menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Namun pihak Kementerian Kesehatan berdasarkan surat No.PL.04.01.4.348/08 tertanggal 1 Februari 2008 menyatakan bahwa pemanfaatan tanah oleh PKBI merupakan pinjam pakai dan PKBI diharapkan segera mengajukan sewa.

Pada tanggal 2 Februari 2012, Pengurus Nasional PKBI telah mengirim surat ke Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengenai permohonan penyelesaian status tanah PKBI. Sebagai respon atas surat tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia meminta kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan sengketa tersebut.

Pada tanggal 13 November 2017, PKBI mendapat undangan tertanggal 10 November 2017 dari Walikota Administratif Kota Jakarta Selatan untuk sosialisasi penertiban bangunan diatas tanah SHP No.374/Gunung milik Kementerian Kesehatan.

Kemudian pada tanggal 23 November 2017, Walikota Jakarta Selatan mengirimkan Surat Peringatan pertama yang berisi perintah pengosongan bangunan diatas lahan Jl. Hang Jebat III/F3 dalam jangka waktu 7x24 jam.

Pengurus Rapat dengan Komisi Ahli Hukum PKBI sepakat bahwa Teddy Soemantri, SH dan tim akan menjadi kuasa Hukum PKBI dalam kasus sengketa ini.

Based on letter No.PL.00.SJ.III.0218 dated 1 March 2006, the Ministry of Health requested that IPPA immediately submit a land lease application.

IPPA responded to the letter from the Ministry of Health on 23 February 2007 with letter No.0154/Ak4.01/2007 stating that based on de facto, IPPA had rights to use and utilize the land. Then IPPA asked the Ministry of Health to consider not demanding the land used by IPPA, and to support the maximum utilization by IPPA and to resolve it in accordance with the regulations.

However, the Ministry of Health, based on letter No.PL.04.01.4.348/08 dated 1 February 2008, stated that the use of the land by IPPA was a loan and IPPA was expected to immediately submit a lease application.

On 2 February 2012, the National Board of IPPA has sent a letter to the National Land Agency of the Republic of Indonesia regarding the request completion status of IPPA's land. In respond to the letter, the Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia requested the the Region Land Agency to conduct a study of the disputed issues.

On 13 November 2017, IPPA received an invitation which dated 10 November 2017 from the Administrative Mayor of South Jakarta City to socialize the regulation of buildings on land certificate (SHP) No.374/Gunung owned by the Ministry of Health.

Then on 23 November 2017, the Mayor of South Jakarta sent the first Warning Letter in order to vacate the building on the land of Jl. Hang Jebat III/F3 within a period of 7x24 hours.

IPPA's management and Legal Expert Commission agreed that Teddy Soemantri, SH and team would be IPPA's legal counsel in this dispute case.

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

PKBI kemudian mengajukan surat gugatan pada tanggal 30 November 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Gubernur DKI Jakarta untuk menghentikan dan/atau menunda segala tindakan pengosongan tanah sengketa dan pembongkaran bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa. Berdasarkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan No.836/Pdt.G/2017/PN.JKT.Sel tanggal 13 November 2018, menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak diterima dan memerintahkan kepada pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara atas sengketa tersebut.

Menindaklanjuti putusan tersebut, pada tanggal 26 November 2018 PKBI mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") - Jakarta. Kemudian pada tanggal 4 Maret 2019, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui putusan No.201/G/2018/PTUN-JKT menyatakan bahwa gugatan dari penggugat tidak diterima.

PKBI melakukan upaya kasasi untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama yaitu putusan pengadilan PTUN. PKBI mengajukan kasasi di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.16K/TUN/2020 tanggal 17 Februari 2020 permohonan kasasi dari PKBI ditolak.

PKBI kemudian mengajukan banding perkara ke tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pada tanggal 21 Juni 2022, pengadilan mengeluarkan putusan dengan No.250/PDT/2022/PT-DKI, yang memutuskan bahwa gugatan PKBI ditolak.

Kemudian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan surat dengan No.HK.05.02/F.I/8052/2022 pada tanggal 15 September 2022 kepada PKBI tentang permohonan penyerahan objek perkara, sehubungan dengan adanya Putusan Banding Perkara Perdata di Pengadilan Tinggi Jakarta No.250/PDT/2022/PT-DKI tanggal 21 Juni 2022.

IPPA then filed a lawsuit on 30 November 2017 in South Jakarta District Court to the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and the Governor of DKI Jakarta to stop and/or postpone all actions to clear the disputed land and demolish buildings standing on the disputed land. Based on the decision of the South Jakarta District Court No.836/Pdt.G/2017/PN.JKT.Sel dated 13 November 2018, it stated that the plaintiff's lawsuit was not accepted and ordered both parties in this case to continue the case for the dispute.

Following up on the judgment in court, on 26 November 2018, PKBI filed a request for its case to be examined and decided in an appeal court to the State Administrative Court ("PTUN") - Jakarta. Then on 4 March 2019, the Jakarta State Administrative Court through decision No.201/G/2018/PTUN-JKT stated that the plaintiff's lawsuit was not accepted.

IPPA made an appeal to revoke the first instance court decision, which the PTUN court judgment. IPPA had submitted an appeal at the Supreme Court (MA) of the Republic of Indonesia. Based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No.16K/TUN/2020 dated 17 February 2020, IPPA's appeal was rejected.

IPPA then appealed the case to the DKI Jakarta High Court. On 21 June 2022, the court issued a decision No.250/PDT/2022/PT-DKI, which decided that IPPA's lawsuit was rejected.

Then the Ministry of Health of the Republic of Indonesia issued a letter with the No.HK.05.02/F.I/8052/2022 dated 15 September 2022 to IPPA regarding the request for the submission of the case object, in connection with the Civil Case Appeal Decision at the Jakarta High Court No.250/PDT/2022/PT-DKI dated 21 June 2022.

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Surat tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada para pihak melalui Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.250/PDT/2022/PT-DKI jo. No. 836/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang diterima Kementerian Kesehatan pada tanggal 11 Agustus 2022 dan telah diterima oleh Kantor Kuasa Hukum PKBI Teddy Soemantry SH, pada tanggal 24 Agustus 2022. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada pokoknya menyatakan "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 November 2018 Nomor 836/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel", mengingat jangka waktu mengajukan upaya hukum Kasasi telah terlewati, maka Putusan telah berkekuatan hukum tetap/Inkracht.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Kesehatan selaku pemegang hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 374 tanggal 10 Agustus 1999 seluas 6.322 m2 menghimbau kepada Pengurus PKBI untuk menyerahkan objek perkara dengan sukarela dan itikad baik, mengingat objek perkara akan segera dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan dan program-program di Kementerian Kesehatan.

PKBI merasa keberatan atas surat yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dan pemberitahuan putusan pengadilan tanggal 24 Agustus 2022, karena kuasa hukum PKBI berhalangan tetap (meninggal dunia). Selain itu, PKBI juga menyampaikan pokok keberatan atas hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PKBI hingga saat ini belum menerima informasi putusan banding secara resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Bahwa hasil pemberitahuan isi putusan banding dari Pengadilan Tinggi Jakarta No.250/PDT/2022/PT-DKI jo. No.836/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tidak benar telah diterima oleh Kantor Kuasa Hukum PKBI Teddy Soemantry pada tanggal 24 Agustus 2022.
- Bahwa kuasa hukum PKBI, Teddy Soemantry telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2020 dan sejak saat itu kantor hukumnya tidak beroperasi.
- Bahwa pemberitahuan isi putusan banding diberikan kepada Kantor Kelurahan Cikini.

This letter has been officially notified to the parties through the Content Notification Release Decision of the DKI Jakarta High Court No.250/PDT/2022/PT-DKI jo. No.836/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel received by the Ministry of Health on 11 August 2022 and has been received by the Office of IPPA Attorney Teddy Soemantry, SH on 24 August 2022. The decision of the DKI Jakarta High Court is basically stated "to strengthen the decision of the South Jakarta District Court dated 13 November 2018 Number 836/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel", considering that the time period for submitting an appeal lawsuit has passed, then the Decision has permanent legal force/Inkracht.

Based on this, the Ministry of Health as the holder of land rights based on the Right to Use Certificate Number 374 dated 10 August 1999 covering an area of 6,322 m2 urges IPPA Management to submit the object of the case voluntarily and in good faith, considering that the object of the case will soon be used for the development of services and programs. Program at the Ministry of Health.

IPPA objects to the letter submitted by the Ministry of Health and the notification of the court decision dated 24 August 2022, because IPPA's attorney is permanently incapacitated (deceased). In addition, IPPA also conveyed the main objections to the following matters:

- *Whereas IPPA has not yet received information on the official appeal decision from the South Jakarta District Court.*
- *Whereas the notification of the contents of the appeal decision of the Jakarta High Court No. 250/PDT/2022/PT-DKI jo. No.836/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel was incorrectly received by the Office of IPPA Attorney Teddy Soemantry on 24 August 2022.*
- *Whereas IPPA's attorney, Teddy Soemantry passed away on 8 September 2020 and since then his law office has not been operational.*
- *That notification of the contents of the appeal decision was given to the Cikini Urban District Office.*

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- Bahwa perhitungan jangka waktu kasasi yang diperhitungkan sejak diterimanya surat pemberitahuan isi putusan banding tersebut sangat merugikan PKBI dan melanggar prinsip kesempatan membela diri sehingga menciptakan ketidakadilan.
- Bahwa PKBI dengan ini mengajukan keberatan terhadap proses pemberitahuan isi putusan banding.
- Bahwa PKBI meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membuat surat pemberitahuan isi putusan banding yang resmi disampaikan langsung kepada PKBI sebagai prinsipal guna menjalankan prinsip memberikan hak membela diri dan dapat menempuh upaya hukum yang tersedia bagi PKBI untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya.

Pada tanggal 11 Mei 2023, PKBI mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak gugatan berdasarkan Putusan No.433/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel pada tanggal 8 November 2023.

PKBI kemudian mengajukan banding atas hasil putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Jakarta melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Nomor Perkara No.433/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel pada tanggal 21 November 2023. Putusan dari Pengadilan Tinggi Jakarta No.1250/PDT/2023/PT DKI pada tanggal 21 November 2023 menyatakan bahwa hasil putusan No.433/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel pada tanggal 8 November 2023 dibatalkan dan menerima permohonan banding yang diajukan oleh PKBI.

Pada tanggal 10 Juli 2024 PKBI diharuskan untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan oleh Kementerian Kesehatan dibantu dengan Satpol PP. PKBI sudah meninggalkan tanah dan gedung tersebut sebagai kantor PKBI Nasional, berdasarkan surat himbauan No.e-0107/HK.02.02 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 30 Mei 2024.

- Whereas the calculation of the cassation period which is calculated from the receipt of the notification of the contents of the appeal decision is very detrimental to IPPA and violates the principle of opportunity for self-defense so as to create injustice.
- Whereas IPPA hereby files an objection to the process of notification of the contents of the appeal decision.
- Whereas IPPA requests the Chairperson of the South Jakarta District Court to make a letter of notification of the contents of the appeal decision which is officially submitted directly to IPPA as the principal in order to provide carrying out the principle of granting the right to self-defense and can take legal remedies available to IPPA to defend its legal rights and interests.

On 11 May 2023, PKBI filed a lawsuit with the South Jakarta District Court and the South Jakarta District Court decided to dismiss the lawsuit based on Decision No.433/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel dated 8 November 2023.

PKBI then filed an objection against the decision to the Jakarta High Court through the South Jakarta District Court Registry in case No.433/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel on 21 November 2023. The decision of the Jakarta High Court No.1250/PDT/2023/PT DKI on 21 November 2023 stated that the decision No.433/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel on 8 November 2023 was canceled and accepted the objection filed by IPPA.

On 10 July 2024 IPPA is required to evacuate office premises by the Ministry of Health and the Satpol PP. As of that date, the entity has ceased operations at the said location and vacated the National Headquarters, based on the letter No.e-0107/HK.02.02 issued by the South Jakarta City Administration on 30 May 2024.

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 19 Agustus 2025 hingga laporan keuangan diterbitkan kantor Nasional PKBI berpindah ke Jalan Pejaten Barat Raya No.16A, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

On 19 August 2025 until the date of the issuance of these financial statements, the PKBI National Office has relocated to Jalan Pejaten Barat Raya No. 16A, Ragunan, Pasar Minggu, South Jakarta.

b. Ketidakpastian Status Hak Atas Tanah PKBI NTB

b. Uncertainty over Land Ownership Rights of PKBI NTB

Pada tanggal 25 Januari 2013 PKBI NTB memiliki tanah dan bangunan di Jl. Bung Karno yang terdampak sengketa lahan antara Pemerintah Provinsi NTB dan PT Lombok Plaza. PKBI NTB ditawarkan tukar guling oleh Pemerintah Provinsi NTB sebagai pengganti atas lahan yang di ambil oleh Pemerintah Provinsi NTB. PKBI NTB memutuskan untuk menggunakan lahan di Jalan Majapahit 11 A. Direktur PKBI NTB bapak Widodo Adi Cahyono menyerahkan sertifikat tanah kepada Pemerintah Provinsi NTB tanpa berita acara penyerahan sebagai komitmen untuk mendirikan bangunan.

On 25 January 2013, PKBI NTB owned land and building on Jl. Bung Karno were affected land dispute between NTB Provincial Government and PT Lombok Plaza. PKBI NTB was offered a land swap by NTB Provincial Government as compensation land taken NTB Provincial Government. PKBI NTB decided to utilize land on Jl. Majapahit 11 A. Director of PKBI NTB Mr. Widodo Adi Cahyono submitted land certificate to NTB Provincial Government without minutes of submission a commitment to construct a building.

Pembangunan gedung baru di Jl. Majapahit 11 A telah selesai pada tanggal 15 Juni 2015 dan ditandatangani berita acara serah terima aset dari PKBI NTB yang diwakili oleh bapak Mawardi Hamry, MPPM kepada Pemerintah Provinsi NTB yang diwakili oleh bapak Drs. H.L. Syafii, MM.— Pada tanggal 1 November 2016 Direktur PKBI NTB Ibu Rr. Satyawanti, MM mengirimkan surat permohonan kepada BPKAD agar Pemerintah Provinsi NTB dan PT Lombok Plaza memenuhi kesepakatan bagi gedung baru untuk ditempati oleh PKBI NTB.

The construction of new building on Jl. Majapahit 11 A was completed on 15 June 2015 and minutes of submission of assets was signed PKBI NTB was represented by Mr. Mawardi Hamry, MPPM. 1 November 2016 the Director of PKBI NTB Mrs. Rr. Satyawanti, MM. has submitted letter of proposal to BPKAD to allow NTB Provincial Government and PT Lombok Plaza comply with the agreement for new building to be occupied PKBI NTB.

Pada tanggal 25 November 2017 PKBI NTB mendapatkan hibah dari Pemerintah Provinsi NTB untuk memenuhi kebutuhan Gedung baru PKBI NTB di Jl. Majapahit 11A. Pada tanggal 4 Januari 2018, PKBI NTB menempati gedung baru di Jl. Majapahit 11A. Namun, belum mendapatkan sertifikat untuk gedung baru

On 25 November 2017 PKBI acquired a grant from NTB Provincial Government to facilitate the establishment of a new PKBI NTB on Jl. Majapahit 11A. On 4 January 2018, PKBI NTB occupied the new building on Jl. Majapahit 11A. However, it has not yet obtained a certificate for the new building.

Pada bulan Desember 2015 klinik PKBI NTB dinyatakan bersalah oleh Dinas Kesehatan Kota Mataram karena tidak memiliki izin sementara lahan di Jl. Bung Karno yang dinyatakan sebagai lahan kosong.

On December 2015 PKBI NTB clinic was declared fault by Mataram City Health Office for unlicensed operation on Jl. Bung Karno which is declared as vacant land.

Pada tanggal 8 November 2016, Sekertaris Daerah mengundang PKBI NTB untuk membahas kesepakatan dengan hasil:

On 8 November 2016, Sekertaris Daerah has invited PKBI NTB to discuss an agreement with following results:

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

- a. Semua kebutuhan gedung PKBI akan dipenuhi oleh PT Lombok Plaza hingga akhir November 2016;
- b. Sertifikat tanah milik PKBI NTB di Jl. Bung Karno dipegang oleh Notaris PT Lombok Plaza;
- c. Penilaian atas tukar menukar gedung baru diajukan ke DPRD NTB, sehingga belum diketahui kapan akan disetujui. Oleh karena itu Biro Hukum akan menyusun perjanjian sewa antara Pemprov dengan PKBI NTB sembari menunggu proses tukar menukar disetujui oleh DPRD.

Pada awal tahun 2021 dokumen serah aset atas tanah di Jl. Bung Karno dan Jl. Majapahit sudah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi NTB, namun belum disetujui oleh DPRD NTB.

c. Ketidakpastian Realisasi Dana Koperasi KBPM Nusantara

Berdasarkan Surat No. 0288/ AK4.01/ 2025 pada tanggal 5 Maret 2025 tentang surat peringatan pelaksanaan atas investasi PKBI Nasional kepada koperasi KBPM Nusantara yang belum dibayarkan.

- a. All PKBI building requirements will be provided by PT Lombok Plaza until the end of November 2016.
- b. The land certificate was owned by PKBI NTB on Jl. Bung Karno is controlled by Notary of PT Lombok Plaza.
- c. The assessment of new building trade swap has been submitted to DPRD NTB, and therefore it is not yet known when approval will be granted. Accordingly, Legal Bureau will be arranging a lease agreement between NTB Provincial Government and PKBI NTB while awaiting approval of the trade swap by DPRD NTB.

In early 2021, document for transfer of asset on Jl. Bung Karno and Jl. Majapahit had been prepared by NTB Provincial Government, however, they had not yet been approved by DPRD NTB.

c. Unrealized Funds – Koperasi of KBPM Nusantara

Based on Letter No. 0288/ AK4.01/2025 on 5 March 2025 regarding a warning letter concerning the implementation of PKBI Nasional investment to KBPM Nusantara which has not been paid.

20. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen Perkumpulan dan telah disetujui oleh Pengurus untuk diterbitkan pada tanggal 3 Maret 2026.

20. Management Responsibility on the Financial Statements

The preparation and fair presentation of the financial statements were the responsibilities of the Federation's management and were approved by the Managements for issuance on 3 March 2026.

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Tidak Audit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
SUPPLEMENTARY INFORMATION**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Informasi tambahan pada Lampiran 1 merupakan informasi keuangan dari PKBI pada tanggal dan untuk tahun berakhir 31 Desember 2024 yang menyajikan informasi keuangan PKBI dan informasi rincian pendapatan dan beban dari masing - masing cabang PKBI.

Lampiran 1

Rincian pendapatan dan beban Pusat dan Daerah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, disajikan sebagai berikut:

1. NASIONAL

	2024 Rp	2023 Rp
PENDAPATAN	35,220,430,603	34,113,092,423
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	13,716,854,676	10,637,698,394
Perjalanan dinas	7,249,188,804	7,860,053,064
Jasa profesional	2,462,572,632	1,352,272,877
Imbalan pascakerja	671,810,763	663,050,445
Cetak dan alat tulis	357,541,020	323,545,118
Penyusutan	250,000,000	--
Obat, peralatan dan bahan	185,932,076	476,049,586
Komunikasi	136,397,459	147,052,399
Lain-lain	11,572,203,876	21,444,677,541
Jumlah beban	36,602,501,306	42,904,399,424

2. PKBI ACEH

	2024 Rp	2023 Rp
PENDAPATAN	1,011,271,029	1,997,850,961
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	770,205,757	771,029,738
Perjalanan dinas	363,340,000	140,435,221
Jasa profesional	131,095,000	114,255,750
Cetak dan alat tulis	84,730,250	21,695,550
Penyusutan	4,835,688	--
Komunikasi	3,778,806	4,685,452
Obat, peralatan dan bahan	2,920,635	3,068,700
Lain-lain	434,768,718	342,522,226
Jumlah beban	1,795,674,854	1,397,692,637

Supplementary information in Appendix 1 is financial information from IPPA as of and for the year ended 31 December 2024, which presents IPPA's financial information and detailed information on revenues and expenses from each IPPA branch..

Appendix 1

A detail of revenues and expenses for Headquarter and Regionals for the year ended 31 December 2024 and 2023, are presented below:

1. NATIONAL

REVENUES
EXPENSES
Salaries and allowances
Business traveling
Professional fees
Post-employment benefits
Printing and stationeries
Depreciation
Medicines, equipments and materials
Communications
Others
Total expenses

2. IPPA ACEH

REVENUES
EXPENSES
Salaries and allowances
Business traveling
Professional fees
Printing and stationeries
Depreciation
Communications
Medicines, equipments, and materials
Others
Total expenses

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Tidak Audit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
SUPPLEMENTARY INFORMATION**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3. PKBI SUMATERA UTARA

	2024 Rp	2023 Rp
PENDAPATAN	1,864,186,321	1,510,295,648
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	1,199,586,296	1,041,711,379
Perjalanan dinas	428,931,068	272,633,000
Imbalan pascakerja	93,530,199	1,475,451
Cetak dan alat tulis	14,275,847	44,132,980
Jasa profesional	5,460,000	5,000,000
Penyusutan	2,118,281	--
Komunikasi	723,721	669,131
Lain-lain	506,272,087	257,360,302
Jumlah beban	2,250,897,499	1,622,982,243

REVENUES

EXPENSES

Salaries and allowances
Business traveling
Post-employment benefits
Printing and stationeries
Professional fees
Depreciation
Communications
Others
Total expenses

4. PKBI SUMATERA BARAT

	2024 Rp	2023 Rp
PENDAPATAN	3,555,707,451	2,742,507,946
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	1,881,342,889	1,703,095,425
Perjalanan dinas	717,269,541	674,080,261
Obat, peralatan dan bahan	84,963,757	32,162,963
Jasa profesional	69,669,500	7,500,000
Imbalan pascakerja	59,563,667	--
Cetak dan alat tulis	48,419,470	50,178,001
Penyusutan	35,077,483	--
Komunikasi	6,488,066	9,850,894
Lain-lain	802,678,792	489,813,014
Jumlah beban	3,705,473,165	2,966,680,558

REVENUES

EXPENSES

Salaries and allowances
Business traveling
Medicines, equipments,
and materials
Professional fees
- Post-employment benefits
Printing and stationeries
Depreciation
Communications
Others
Total expenses

3. IPPA NORTH SUMATERA

4. IPPA WEST SUMATERA

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Tidak Audit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
SUPPLEMENTARY INFORMATION**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

5. PKBI JAMBI

	2024 Rp	2023 Rp
PENDAPATAN	107,543,138	724,592,622
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	76,243,347	453,995,501
Perjalanan dinas	2,500,000	94,933,200
Jasa profesional	2,180,000	15,050,000
Komunikasi	1,189,758	10,241,636
Cetak dan alat tulis	1,157,300	8,147,895
Obat, peralatan dan bahan	--	--
Lain-lain	85,583,962	220,869,188
Jumlah beban	168,854,367	803,237,420

REVENUES

EXPENSES

Salaries and allowances
Business traveling
Professional fees
Communications
Printing and stationeries
Medicines, equipments,
and materials
Others

Total expenses

5. IPPA JAMBI

6. PKBI BENGKULU

	2024 Rp	2023 Rp
PENDAPATAN	1,003,715,020	1,233,425,884
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	233,190,180	714,820,718
Perjalanan dinas	26,300,000	346,744,800
Cetak dan alat tulis	8,241,001	23,843,567
Komunikasi	745,244	6,890,098
Jasa profesional	30,587,500	3,925,000
Lain-lain	146,672,242	256,758,949
Jumlah beban	445,736,167	1,352,983,132

REVENUES

EXPENSES

Salaries and allowances
Business traveling
Printing and stationeries
Communications
Professional fees
Others

Total expenses

6. IPPA BENGKULU

7. PKBI LAMPUNG

	2024 Rp	2023 Rp
PENDAPATAN	125,708,379	206,776,233
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	71,090,500	154,559,520
Perjalanan dinas	11,650,000	39,150,000
Jasa profesional	3,994,500	10,800,000
Cetak dan alat tulis	1,933,500	4,262,730
Komunikasi	410,870	2,312,000
Lain-lain	1,637,710	66,080,112
Jumlah beban	90,717,080	277,164,362

REVENUES

EXPENSES

Salaries and allowances
Business traveling
Professional fees
Printing and stationeries
Communications
Others

Total expenses

7. IPPA LAMPUNG

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Tidak Audit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
SUPPLEMENTARY INFORMATION**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. PKBI SUMATERA SELATAN

	2024	2023
	Rp	Rp
PENDAPATAN	146,850,127	708,135,516
BEBAN		
Penyusutan	68,827,988	--
Perjalanan dinas	68,430,000	182,491,138
Cetak dan alat tulis	10,860,000	25,398,430
Komunikasi	3,557,500	8,545,024
Gaji dan tunjangan	3,261,526	442,424,893
Jasa profesional	--	5,000,000
Lain-lain	27,654,012	91,354,296
Jumlah beban	182,591,026	755,213,781

REVENUES

EXPENSES

Depreciation
Business traveling
Printing and stationeries
Communications
Salaries and allowances
Professional fees
Others
Total expenses

9. PKBI DKI JAKARTA

	2024	2023
	Rp	Rp
PENDAPATAN	18,117,388,802	15,268,516,245
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	10,582,855,011	9,934,465,533
Perjalanan dinas	2,134,653,204	1,898,975,635
Jasa profesional	697,988,499	750,483,309
Imbalan pascakerja	685,394,292	1,512,150
Cetak dan alat tulis	100,436,994	218,155,138
Obat, peralatan dan bahan	11,268,020	54,750,269
Komunikasi	7,058,623	13,061,082
Lain-lain	3,874,698,492	2,246,698,378
Jumlah beban	18,094,353,135	15,118,101,494

REVENUES

EXPENSES

Salaries and allowances
Business traveling
Professional fees
Post-employment benefits
Printing and stationeries
Medicines, equipments,
and materials
Communications
Others
Total expenses

10. PKBI JAWA BARAT

	2024	2023
	Rp	Rp
PENDAPATAN	35,337,518,018	40,566,870,346
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	24,976,153,187	26,593,391,474
Perjalanan dinas	4,810,094,224	9,265,372,105
Imbalan pascakerja	1,558,941,618	--
Cetak dan alat tulis	453,631,090	516,238,007
Komunikasi	220,212,918	116,993,861
Penyusutan	102,643,422	53,880,276
Jasa profesional	90,700,900	539,799,750
Obat, peralatan dan bahan	23,389,462	125,882,060
Lain-lain	3,152,737,616	4,261,964,412
Jumlah beban	35,388,504,437	41,473,521,945

REVENUES

EXPENSES

Salaries and allowances
Business traveling
Post-employment benefits
Printing and stationeries
Communications
Depreciation
Professional fees
Medicines, equipments,
and materials
Others
Total expenses

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Tidak Audit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
SUPPLEMENTARY INFORMATION**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

11. PKBI JAWA TENGAH

	2024 Rp	2023 Rp
PENDAPATAN	2,433,740,709	3,129,816,334
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	1,486,966,754	1,629,883,599
Perjalanan dinas	146,769,169	317,041,847
Obat, peralatan dan bahan	105,353,990	221,779,042
Penyusutan	104,146,269	116,429,786
Jasa profesional	73,323,733	19,726,000
Cetak dan alat tulis	53,919,252	64,025,076
Komunikasi	20,332,323	36,440,954
Lain-lain	523,508,426	901,886,562
Jumlah beban	2,514,319,916	3,307,212,866

REVENUES

EXPENSES

Salaries and allowances
Business traveling
Medicines, equipments,
and materials
Depreciation
Professional fees
Printing and stationeries
Communications
Others
Total expenses

12. PKBI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

	2024 Rp	2023 Rp
PENDAPATAN	2,748,565,581	3,129,816,334
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	1,265,210,889	2,588,049,134
Jasa profesional	671,950,000	180,278,860
Perjalanan dinas	273,624,587	738,335,989
Cetak dan alat tulis	63,812,810	136,717,349
Obat, peralatan dan bahan	43,989,800	29,085,047
Penyusutan	25,670,326	26,557,531
Komunikasi	8,575,880	15,680,108
Imbalan pascakerja	3,333,333	--
Lain-lain	455,489,652	391,686,015
Jumlah beban	2,811,657,277	4,106,390,033

REVENUES

EXPENSES

Salaries and allowances
Professional fees
Business traveling
Printing and stationeries
Medicines, equipments,
and materials
Depreciation
Communications
Post-employment benefits
Others
Total expenses

13. PKBI JAWA TIMUR

	2024 Rp	2023 Rp
PENDAPATAN	5,983,348,778	7,159,759,566
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	4,132,827,251	5,955,341,179
Obat, peralatan dan bahan	263,965,580	--
Perjalanan dinas	262,469,222	118,091,924
Cetak dan alat tulis	45,970,211	57,570,040
Jasa profesional	31,912,500	66,002,952
Komunikasi	11,298,535	24,305,048
Lain-lain	1,260,320,743	711,623,398
Jumlah beban	6,008,764,042	6,932,934,541

REVENUES

EXPENSES

Salaries and allowances
Medicines, equipments,
and materials
Business traveling
Printing and stationeries
Professional fees
Communications
Others
Total expenses

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Tidak Audit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
SUPPLEMENTARY INFORMATION**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. PKBI BALI

	2024 Rp	2023 Rp
PENDAPATAN	1,813,949,370	3,149,568,830
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	838,118,564	1,629,007,363
Jasa profesional	285,692,000	159,520,000
Perjalanan dinas	75,668,000	419,326,665
Penyusutan	43,483,789	41,834,654
Obat, peralatan dan bahan	36,728,320	4,377,800
Cetak dan alat tulis	19,951,260	214,421,135
Komunikasi	10,875,036	9,856,657
Lain-lain	1,049,654,297	1,033,674,438
Jumlah beban	2,360,171,266	3,512,018,712

REVENUES

EXPENSES

Salaries and allowances
Professional fees
Business traveling
Depreciation
Medicines, equipments,
and materials
Printing and stationeries
Communications
Others
Total expenses

15. PKBI NUSA TENGGARA BARAT

	2024 Rp	2023 Rp
PENDAPATAN	5,855,970,778	932,678,862
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	2,585,651,888	2,684,613,351
Perjalanan dinas	1,996,224,600	2,698,414,221
Jasa profesional	131,547,100	64,355,000
Cetak dan alat tulis	100,322,360	236,682,050
Obat, peralatan dan bahan	19,038,309	17,233,200
Komunikasi	15,858,732	180,633,071
Lain-lain	3,559,066,282	1,633,917,608
Jumlah beban	8,407,709,271	7,515,848,501

REVENUES

EXPENSES

Salaries and allowances
Business traveling
Professional fees
Printing and stationeries
Medicines, equipments,
and materials
Communications
Others
Total expenses

16. PKBI NUSA TENGGARA TIMUR

	2024 Rp	2023 Rp
PENDAPATAN	2,162,568,989	2,324,704,090
BEBAN		
Perjalanan dinas	673,010,686	461,136,000
Gaji dan tunjangan	635,181,679	910,387,503
Jasa profesional	126,960,000	184,588,000
Cetak dan alat tulis	50,340,800	59,393,200
Penyusutan	7,492,871	--
Komunikasi	3,523,000	5,481,000
Lain-lain	561,728,171	373,993,698
Jumlah beban	2,058,237,207	1,994,979,401

REVENUES

EXPENSES

Business traveling
Salaries and allowances
Professional fees
Printing and stationeries
Depreciation
Communications
Others
Total expenses

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Tidak Audit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
SUPPLEMENTARY INFORMATION**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

17. PKBI KALIMANTAN BARAT

	2024 Rp	2023 Rp
PENDAPATAN	38,066,686	461,137,004
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	14,203,805	321,735,623
Penyusutan	4,108,070	--
Perjalanan dinas	3,975,000	91,501,450
Komunikasi	1,312,305	749,650
Cetak dan alat tulis	517,700	10,413,400
Jasa profesional	--	930,000
Lain-lain	39,162,479	115,994,049
Jumlah beban	63,279,359	541,324,172

REVENUES

EXPENSES

Salaries and allowances
Depreciation
Business traveling
Communications
Printing and stationeries
Professional fees
Others
Total expenses

18. PKBI KALIMANTAN TENGAH

	2024 Rp	2023 Rp
PENDAPATAN	364,599,782	728,030,381
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	173,054,948	372,513,688
Perjalanan dinas	63,854,000	160,903,000
Jasa profesional	21,305,000	88,510,500
Cetak dan alat tulis	4,725,193	17,695,745
Komunikasi	--	600,000
Lain-lain	90,842,783	131,768,482
Jumlah beban	353,781,924	771,991,415

REVENUES

EXPENSES

Salaries and allowances
Business traveling
Professional fees
Printing and stationeries
Communications
Others
Total expenses

19. PKBI KALIMANTAN SELATAN

	2024 Rp	2023 Rp
PENDAPATAN	920,556,966	1,541,577,816
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	632,537,935	935,395,256
Perjalanan dinas	119,224,500	338,839,657
Cetak dan alat tulis	8,755,200	22,443,900
Imbalan pascakerja	629,919	--
Jasa profesional	602,500	50,585,000
Komunikasi	222,300	1,377,500
Lain-lain	200,110,195	204,077,656
Jumlah beban	962,082,549	1,552,718,969

REVENUES

EXPENSES

Salaries and allowances
Business traveling
Printing and stationeries
Post-employment benefits
Professional fees
Communications
Others
Total expenses

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Tidak Audit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
SUPPLEMENTARY INFORMATION**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

20. PKBI KALIMANTAN TIMUR

	2024	2023
	Rp	Rp
PENDAPATAN	3,013,381,507	1,541,577,816
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	2,188,747,440	3,597,972,602
Perjalanan dinas	254,716,600	340,343,471
Penyusutan	140,918,940	--
Imbalan pascakerja	131,497,255	1,764,600
Cetak dan alat tulis	35,138,940	58,921,737
Komunikasi	13,363,914	13,765,845
Jasa profesional	6,780,000	8,685,000
Lain-lain	407,767,420	569,330,475
Jumlah beban	3,178,930,509	4,590,783,730

REVENUES

EXPENSES

Salaries and allowances
Business traveling
Depreciation
Post-employment benefits
Printing and stationeries
Communications
Professional fees
Others

Total expenses

20. IPPA EAST KALIMANTAN

21. PKBI SULAWESI UTARA

	2024	2023
	Rp	Rp
PENDAPATAN	3,723,017,206	3,802,413,581
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	2,724,868,082	2,919,423,772
Perjalanan dinas	597,787,708	199,951,979
Komunikasi	15,011,050	23,581,550
Cetak dan alat tulis	13,732,763	16,303,200
Obat, peralatan dan bahan	4,937,925	1,573,000
Imbalan pascakerja	17,470,059	--
Jasa profesional	40,000,000	900,000
Lain-lain	325,273,925	846,095,321
Jumlah beban	3,739,081,512	4,007,828,822

REVENUES

EXPENSES

Salaries and allowances
Business traveling
Communications
Printing and stationeries
Medicines, equipments,
and materials
Post-employment benefits
Professional fees
Others

Total expenses

21. IPPA NORTH SULAWESI

22. PKBI SULAWESI TENGAH

	2024	2023
	Rp	Rp
PENDAPATAN	704,730,542	1,077,847,600
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	1,033,142,863	769,977,444
Imbalan pascakerja	66,910,384	768,474
Perjalanan dinas	47,990,000	95,116,819
Komunikasi	4,376,500	1,263,100
Cetak dan alat tulis	4,034,300	5,559,550
Jasa profesional	660,000	2,000,000
Lain-lain	117,791,560	128,139,294
Jumlah beban	1,274,905,607	1,002,824,681

REVENUES

EXPENSES

Salaries and allowances
Post-employment benefits
Business traveling
Communications
Printing and stationeries
Professional fees
Others

Total expenses

22. IPPA CENTRAL SULAWESI

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Tidak Audit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
SUPPLEMENTARY INFORMATION**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

23. PKBI SULAWESI SELATAN

	2024	2023
	Rp	Rp
PENDAPATAN	389,301,421	1,056,224,791
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	207,735,474	553,936,635
Jasa profesional	41,067,000	42,230,000
Perjalanan dinas	26,600,000	311,506,131
Cetak dan alat tulis	2,654,000	26,168,702
Obat, peralatan dan bahan	1,179,375	--
Komunikasi	--	7,243,606
Penyusutan	--	665,876
Lain-lain	135,435,068	173,131,083
Jumlah beban	414,670,917	1,114,882,033

REVENUES

EXPENSES

Salaries and allowances
Professional fees
Business traveling
Printing and stationeries
Medicines, equipments,
and materials
Communications
Depreciation
Others
Total expenses

24. PKBI PAPUA

	2024	2023
	Rp	Rp
PENDAPATAN	3,144,727,728	1,104,528,846
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	1,695,228,884	967,217,296
Perjalanan dinas	645,248,359	42,150,000
Imbalan pascakerja	115,456,116	51,455,742
Jasa profesional	68,600,000	--
Cetak dan alat tulis	23,042,000	18,199,300
Komunikasi	--	4,734,500
Lain-lain	645,099,631	75,632,634
Jumlah beban	3,192,674,990	1,159,389,472

REVENUES

EXPENSES

Salaries and allowances
Business traveling
Post-employment benefits
Professional fees
Printing and stationeries
Communications
Others
Total expenses

25. PKBI RIAU

	2024	2023
	Rp	Rp
PENDAPATAN	10,957,574,705	9,683,749,788
BEBAN		
Gaji dan tunjangan	7,125,831,553	4,701,620,457
Perjalanan dinas	1,420,191,155	3,446,836,038
Cetak dan alat tulis	106,201,322	109,600,341
Imbalan pascakerja	103,265,881	--
Jasa profesional	53,922,000	13,500,000
Komunikasi	15,410,996	17,881,211
Obat, peralatan dan bahan	14,826,000	--
Lain-lain	1,260,547,383	1,955,821,081
Jumlah beban	10,100,196,290	10,245,259,128

REVENUES

EXPENSES

Salaries and allowances
Business traveling
Printing and stationeries
Post-employment benefits
Professional fees
Communications
Medicines, equipments,
and materials
Others
Total expenses

**PERKUMPULAN KELUARGA
BERENCANA INDONESIA
INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (Tidak Audit)
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**INDONESIAN PLANNED
PARENTHOOD ASSOCIATION
SUPPLEMENTARY INFORMATION**

For the Years Ended
31 December 2024 and 2023 (Unaudited)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

26. PKBI KEPULAUAN RIAU

	2024
	Rp
PENDAPATAN	2,763,451,422
BEBAN	
Gaji dan tunjangan	2,037,939,853
Perjalanan dinas	253,800,834
Imbalan pascakerja	87,897,151
Jasa profesional	40,850,000
Cetak dan alat tulis	21,876,370
Penyusutan	3,950,004
Komunikasi	2,905,066
Lain-lain	335,259,120
Jumlah beban	2,784,478,398

26. IPPA RIAU ARCHIPELAGO

	2023	
	Rp	
REVENUES	2,594,742,364	
EXPENSES		
Salaries and allowances	1,709,292,509	
Business traveling	719,366,302	
Post-employment benefits	--	
Professional fees	--	
Printing and stationeries	26,311,000	
Depreciation	3,950,004	
Communications	--	
Others	105,245,077	
Total expenses	2,564,164,892	